



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.13, No.1, Juni 2016

KOMUNITAS ASEAN DAN TANTANGAN KE DEPAN

- Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian *Cybersecurity* melalui *ASEAN Regional Forum on Cybersecurity Initiatives*
- Membaca “PHK Massal”: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan Bagi Gerakan Buruh di Indonesia
- Transformasi Ruang dan Partisipasi *Stakeholders*: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN Pasca-2003
- Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat

RESUME PENELITIAN

- Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru
- Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara
- Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN

REVIEW BUKU

- Neotradisionalisme dan Distopianisme: Tinjauan atas Tiga Buku Robert D. Kaplan

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 13	No. 1	Hlm. 1-143	Jakarta, Juni 2016	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------

**Jurnal
Penelitian Politik**



Mitra Bestari

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam, serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2P-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2P-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2P-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Bahtiar Effendy (*Ahli Kajian Politik Islam*)
Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (*Ahli Kajian Pertahanan dan Hubungan Internasional*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Prof. Dr. Dede Mariana (*Ahli Kajian Politik Lokal dan Pemerintahan*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN, Eropa*)
Dr. Nurliah Nurdin (*Ahli Kajian Pemilu dan Pemerintahan*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Nico Harjanto, Ph.D (*Ahli Kajian Perbandingan Politik*)

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Pemimpin Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi

Adriana Elisabeth, Ph.D (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Kurniawati Hastuti Dewi, Ph.D (*Ahli Kajian Politik Lokal, Gender dan Politik*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)

Redaksi Pelaksana

Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)
Athiqah Nur Alami, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

Sekretaris Redaksi

Hayati Nufus, S.Hum
Esty Ekawati, S.IP., M.IP
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id

ISSN

1829-8001

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii-v
Artikel	
• Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cybersecurity melalui ASEAN Regional Forum on Cybersecurity Initiatives <i>David Putra Setyawan dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari</i>	1-20
• Membaca “PHK Massal”: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan Bagi Gerakan Buruh di Indonesia <i>Fathimah Fildzah Izzati</i>	21-32
• Transformasi Ruang dan Partisipasi Stakeholders: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN Pasca-2003 <i>Ahmad Rizky Mardhatillah Umar</i>	33-52
• Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat <i>Sandy Nur Ikfal Raharjo</i>	53-68
Resume Penelitian	
• Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru <i>Diandra Megaputri Mengko, dkk</i>	69-82
• Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara <i>Awani Irewati, dkk</i>	83-104
• Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN <i>Khanisa, dkk</i>	105-118
Review Buku	
• Neotradisionalisme dan Distopianisme: Tinjauan atas Tiga Buku Robert D. Kaplan <i>Nanto Sriyanto</i>	119-136
Tentang Penulis	137-138
Pedoman Penulisan	141-145

CATATAN REDAKSI

Tahun 2016 menjadi tahun yang sangat penting bagi Indonesia dan ASEAN, karenan di permulaan tahun ini Komunitas ASEAN resmi dijalankan. Pembentukan komunitas ini disepakati oleh sepuluh negara anggota ASEAN untuk mewujudkan cita-cita integrasi di antara mereka. Integrasi di kawasan ini juga diharapkan dapat membuka pintu yang lebih lebar bagi peluang kerja sama di tingkat ASEAN, sehingga dapat membawa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan ini. Selain peningkatan kesejahteraan di kawasan, hal lain yang juga ingin dicapai oleh ASEAN adalah membangun komunitas yang menguatkan solidaritas di antara anggotanya dan lebih bersifat people-oriented. Di tengah dinamika politik dan ekonomi di tingkat internasional yang semakin kompleks, Komunitas ASEAN diharapkan mampu mendorong sepuluh anggotanya untuk meningkatkan daya saing mereka miliki, sehingga ASEAN siap menghadapi tantangan regional dan internasional yang ada. Dalam membangun komunitas yang dicita-citakan, dibentuklah tiga pilar utama, yaitu: Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN diharapkan mampu menjaga ASEAN untuk tetap berkomitmen dalam memelihara stabilitas dan keamanan di kawasan. Hal ini diperlukan agar ASEAN dapat membangun lingkungan politik yang harmonis yang mampu menghadapi ancaman-ancaman dari luar ataupun potensi konflik di dalam tubuh ASEAN sendiri. Sementara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, ASEAN membangun Komunitas Ekonomi ASEAN dengan tujuan untuk mendorong pergerakan roda ekonomi dan perdagangan antarnegara anggota ASEAN yang mampu bersaing secara sehat. Peningkatan daya saing produk-produk dari masing-masing negara anggota ASEAN diperlukan agar ASEAN dapat mengambil peluang yang besar

dari perdagangan bebas di dunia internasional. Komunitas Ekonomi ASEAN atau yang juga dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diharapkan dapat memperkecil gap perkembangan ekonomi di antara negara anggota ASEAN dan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh anggota ASEAN. Selain peningkatan kesejahteraan ekonomi, ASEAN juga mengharapkan terbentuknya masyarakat yang memiliki solidaritas dan rasa kebersamaan yang kuat terhadap ASEAN. Untuk itulah dibentuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Kedekatan geografis diharapkan tidak hanya mampu menjalin keterhubungan secara fisik di ASEAN, namun juga mampu menjalin keterhubungan di antara masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Implementasi tiga pilar Komunitas ASEAN pada dasarnya akan membawa peluang yang sangat besar bagi ASEAN. Akan tetapi, pemberlakuan Komunitas ASEAN juga harus menghadapi beberapa tantangan yang muncul baik dari dalam tubuh ASEAN ataupun dari luar. Perbedaan tingkat kemajuan di antara negara anggota merupakan tantangan internal yang harus dihadapi ASEAN. Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi negara-negara anggota ASEAN dapat menjadi ganjalan integrasi yang ingin dicapai oleh ASEAN, terutama dalam sektor ekonomi. Selain itu, perbedaan kesiapan masing-masing negara dalam menghadapi Komunitas ASEAN juga menjadi tantangan bagi ASEAN. Sementara tantangan dari luar misalnya adalah tantangan yang muncul dari konstelasi politik internasional yang masih didominasi oleh kekuatan-keuatan negara besar, seperti Amerika dan Tiongkok. Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan empat negara anggota ASEAN (Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam) dan Tiongkok apabila tidak dapat dikelola dengan baik dapat menjadi ganjalan bagi kestabilan di kawasan ini.

Bagi Indonesia, Komunitas ASEAN juga membuka peluang yang besar, terutama dalam mendorong peningkatan daya saing yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, dilihat dari kesiapannya, peluang yang ada tidak dapat diambil secara optimal oleh Indonesia apabila pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia masih belum memenuhi harapan. Kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, pembangunan infrastruktur, kerangka hukum, serta kebijakan pemerintah yang mendorong partisipasi Indonesia dalam Komunitas ASEAN dirasa masih kurang. Dari segi sosial masyarakat, Indonesia masih harus menghadapi kenyataan bahwa kesadaran masyarakat akan Komunitas ASEAN masih rendah. Belum banyak masyarakat yang menyadari arti penting Komunitas ASEAN atau ASEAN sendiri bagi Indonesia. Melihat kenyataan ini, *Jurnal Penelitian Politik* kali ini mengangkat tema “Komunitas ASEAN dan Tantangan ke Depan” untuk melihat lebih lanjut sejauh mana implementasi Komunitas ASEAN akan membawa dampak bagi ASEAN ataupun Indonesia, dan tantangan apa saja yang akan dihadapi di masa mendatang. *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini menyajikan lima artikel, dan tiga resume hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim-tim penelitian yang ada di Pusat Penelitian Politik LIPI.

Artikel pertama berjudul **“Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cyber Security Melalui ASEAN Regional Forum on Cyber Security Initiatives”** yang ditulis oleh David Putra Setyawan dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari mencoba membahas tentang upaya Indonesia dalam memanfaatkan ASEAN Regional Forum (ARF) on cyber security initiatives untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mendukung keamanan nasional di bidang cyber. Kemajuan teknologi, terutama di bidang cyber telah membuat batas antarnegara menjadi semakin kabur. Hal ini memicu munculnya kejahatan dan ancaman nirmiliter di bidang teknologi bagi sebuah negara dalam bentuk ancaman cyber. Untuk menghadapi hal tersebut Indonesia memerlukan strategi untuk melindungi keamanannya. ARF menjadi salah satu forum yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengajak negara-negara ASEAN dan negara mitranya untuk bekerja sama dalam

meningkatkan pertahanan dan menjaga stabilitas di kawasan.

Sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus ketika kita berbicara tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi Komunitas ASEAN. Artikel yang ditulis oleh Fathimah Fildzah Izzati yang berjudul **“Membaca ‘PHK Massal’: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan bagi Gerakan Buruh di Indonesia”** mencoba melihat dampak pemberlakuan MEA bagi buruh-buruh yang ada di Indonesia. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menyongsong MEA sempat menimbulkan isu “PHK Massal”. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan peran gerakan buruh dalam menghadapi MEA, terutama dalam bidang industri elektronik.

Artikel berjudul **“Transformasi Ruang dan Partisipasi Stakeholders: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN pasca-2003”** ditulis oleh Ahmad Rizky Mardhatillah Umar. Artikel ini menjelaskan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam dua sektor regionalisasi ASEAN, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sejak bertransformasi menjadi bentuk ‘Masyarakat ASEAN’ pada tahun 2003, mulai muncul interaksi yang lebih kompleks antara ‘negara’ dan aktor-aktor ‘non-negara’. Artikel ini berargumen bahwa Masyarakat ASEAN telah membuka ruang yang lebih besar untuk mengakomodasi partisipasi ‘pemangku kepentingan’/stakeholders yang ada di dalamnya.

Dengan adanya integrasi di kawasan ASEAN melalui implementasi Komunitas ASEAN, masyarakat yang paling merasakan dampak langsung keterhubungan dan menipisnya batas antarnegara melalui integrasi tersebut adalah masyarakat di perbatasan. Artikel berjudul **“Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat”** mencoba mengulas tentang sejauh mana kesiapan yang dimiliki oleh warga di wilayah perbatasan Indonesia dalam menyongsong

pemberlakuan Komunitas Ekonomi ASEAN. Artikel yang ditulis oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo ini melihat ketahanan yang dimiliki masyarakat di Entikong melalui enam modal: modal alam, modal sosial, modal keuangan, modal politik/pemerintahan, modal fisik, dan modal manusia. Dari hasil analisis ini direkomendasikan bahwa pemerintah perlu melakukan reoptimalisasi kerja sama lintas perbatasan dengan negara lain untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di perbatasan, dan perlu membuat aturankhusus untuk perdagangan lintas batas di dalam MEA.

Selain lima artikel di atas, *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini juga menampilkan tiga resume penelitian yang telah dilakukan oleh tim-tim penelitian di Pusat Penelitian Politik. Resume penelitian pertama adalah mengenai perkembangan intelegen di Indonesia. Dalam ringkasan penelitian yang berjudul **“Intelejen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”** yang disusun oleh Ikrar Nusa Bhakti dan Diandra Mengko Megaputri dibahas mengenai perkembangan dinamika intelegen Indonesia terutama pada masa setelah orde baru. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang teori intelegen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia.

Tim Penelitian yang ada di Pusat Penelitian Politik LIPI pada tahun 2015 juga melakukan penelitian yang terkait dengan Komunitas ASEAN. Salah satunya adalah resume penelitian berjudul **“Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara”** yang disusun oleh Awani Irewati, dkk. Pada penelitian ini Tim Perbatasan Pusat Penelitian Politik LIPI melakukan penelitian tentang upaya pembangunan keterhubungan melalui kerja sama lintas perbatasan di sub-kawasan Sungai Mekong antara Tiongkok dengan lima negara ASEAN: Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Dalam kerja sama sub-kawasan ini, Tiongkok sebagai negara non-ASEAN menjadi salah satu penggerak aktif kerja sama *Greater Mekong Subregion*. Keterhubungan yang dilihat bukan hanya keterhubungan fisik saja, melainkan juga keterhubungan institusi dan keterhubungan masyarakat. Kerja sama sub-kawasan di ASEAN

sangat penting, terutama untuk mempersempit adanya gap perkembangan antara ASEAN bagian utara dengan negara anggota ASEAN yang lainnya. Dalam artikel ini juga dibahas mengenai peran kerja sama sub-kawasan di ASEAN dalam membangun keterhubungan yang akan mendorong kesuksesan implementasi Komunitas ASEAN.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa salah satu tantangan bagi Indonesia dalam melaksanakan Komunitas ASEAN adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap Komunitas ASEAN. Hal ini sesuai dengan hasil survey yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Politik pada tahun 2015. Dalam ringkasan penelitian terakhir berjudul **“Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN”** yang disusun oleh Khanisa, dkk dijelaskan bahwa kesadaran dan pemahamann publik menjadi faktor kunci yang menentukan apakah pilar-pilar yang telah disusun untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dapat direalisasikan dengan baik. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang ditunjukkan untuk Kementerian terkait. Strategi yang disarankan salah satunya adalah menekankan sebuah upaya berkelanjutan dan memiliki sasaran yang lebih nyata dalam melaksanakan program-program sosialisasi mengenai ASEAN dan Komunitas ASEAN kepada masyarakat.

Catatan redaksi kali ini kami tutup dengan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi sehingga *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini dapat terbit. Terima kasih kami ucapkan untuk penulis, mitra bestari, serta tim pengelola jurnal. Semoga *Jurnal Penelitian Politik* ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah keilmuan dan praktis terkait dengan kajian mengenai ASEAN dan Komunitas ASEAN, serta dampaknya bagi Indonesia. Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 324.2598

**David Putra Setyawan, Arwin Datumaya
Wahyudi Sumari**

**DIPLOMASI PERTAHANAN
INDONESIA DALAM PENCAPAIAN
CYBERSECURITY MELALUI
ASEAN REGIONAL FORUM ON
CYBERSECURITY INITIATIVES**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 1-20

Perkembangan teknologi informasi di dunia internasional berdampak pada penggunaan ruang cyber yang mencakup semua aspek kehidupan nasional. Dihadapkan pada kondisi ini, pemerintah harus memahami kondisi cybersecurity di Indonesia dan membangunnya agar mampu mengatasi berbagai ancaman yang datang melalui ruang cyber. Selain kondisi internal, ruang lingkup eksternal perlu diperhatikan mengingat ancaman cyber yang bersifat transnasional, melewati batas kedaulatan, dan telah dipandang sebagai ancaman bersama oleh negara-negara di dunia. ASEAN telah menjadi salah satu wadah bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mendukung keamanan nasional di bidang cyber. Melalui ASEAN Regional Forum (ARF) on cybersecurity initiatives, strategi diplomasi pertahanan diarahkan untuk meningkatkan rasa saling percaya (confidence building measures) antar negara dan mengurangi potensi ancaman yang dapat ditimbulkan dari lingkup eksternal. Upaya tersebut, menghasilkan kesepakatan berupa point of contacts antar negara dan persamaan pandangan untuk terus mengadakan pelatihan cybersecurity dalam bentuk seminar maupun workshop untuk membangun kapasitas sumber daya manusia. Strategi dan upaya tersebut dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan data-data primer dikumpulkan melalui

wawancara dengan 15 informan dari berbagai instansi pemerintahan. Selain itu, literatur, jurnal, dan dokumen terkait juga digunakan sebagai data pendukung.

Kata Kunci: ARF, confidence building measures, cybersecurity, diplomasi pertahanan

DDC: 324.2598

Fathimah Fildzah Izzati

**MEMBACA “PHK MASSAL”:
RANTAI NILAI INDUSTRI
ELEKTRONIK, MEA, DAN TANTANGAN
BAGI GERAKAN BURUH DI INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 21-32

“PHK Massal” sempat menjadi isu dalam politik perburuhan awal tahun 2016 setelah kemunculan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dalam rangka menyambut keterlibatan Indonesia dalam MEA. Adanya konstruksi kata “massal” dalam isu PHK ini tidak sejalan dengan data ketenagakerjaan, namun lebih terkait erat dengan politik produksi dalam industri elektronik. Pada sisi lain, kerentanan gerakan buruh di sektor elektronik pun kian meningkat seiring dengan meningkatnya fleksibilitas pasar tenaga kerja dalam rezim pasar bebas, termasuk dalam konteks MEA. Tulisan ini membahas hubungan antara isu PHK massal dengan rantai nilai industri elektronik di tingkat global, MEA, dan tantangan bagi gerakan buruh di Indonesia. Tujuannya untuk menunjukkan peran gerakan buruh dalam menghadapi skema ekonomi seperti MEA terutama di dalam industri elektronik melalui analisis teori rantai nilai. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, tulisan ini menemukan bahwa gerakan buruh di Indonesia memiliki

peluang yang besar untuk membangun kekuatan di tingkat regional dengan memosisikan dirinya di dalam rantai nilai global dan rezim pasar tenaga kerja fleksibel.

Kata Kunci: PHK Massal, Rantai Nilai Industri Elektronik, Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja, MEA, Gerakan Buruh

DDC: 320.014

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

TRANSFORMASI RUANG DAN PARTISIPASI *STAKEHOLDERS*: MEMAHAMI KETERLIBATAN MASYARAKAT SIPIL DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH INDONESIA DALAM PROSES REGIONALISME ASEAN PASCA-2003

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 33-52

Artikel ini mencoba untuk menjelaskan keterlibatan stakeholders tersebut dalam dua sektor regionalisasi ASEAN: Hak Asasi Manusia (HAM) dan Usaha Kecil & Menengah (UKM). Sejak bertransformasi menjadi bentuk ‘Masyarakat ASEAN’ pada tahun 2003, mulai muncul interaksi yang lebih kompleks antara ‘negara’ dan aktor-aktor ‘non-negara’. Sebelum 2003, ASEAN hanya diposisikan sebagai ‘organisasi internasional’ yang berpusat pada negara anggota sebagai satu-satunya aktor di kawasan. Menyusul diberlakukannya Masyarakat ASEAN pada tahun 2003, artikel ini berargumen bahwa Masyarakat ASEAN telah membuka ruang yang lebih besar bagi kontestasi antara negara dan ‘pemangku kepentingan’/ stakeholders yang ada di dalamnya, terutama kelompok bisnis (konglomerat dan UKM) serta organisasi masyarakat sipil. Dengan menggunakan perspektif kritis, artikel ini mencoba untuk menunjukkan bahwa sebetulnya pola interaksi yang terbangun antara aktor-aktor ‘non-negara’ dan ‘negara’ dalam spektrum Masyarakat ASEAN dimungkinkan oleh interaksi yang kian besar antara aktor-aktor yang ada di dalamnya, sehingga membuka kontestasi antar-stakeholders dalam organisasi regional yang telah bertransformasi. Hal ini kemudian memberikan pemahaman yang lebih kompleks tentang regionalisme di Asia Tenggara. Argumen tersebut akan dijelaskan melalui dua studi

kasus, yaitu aktivitas Organisasi Masyarakat Sipil HAM dan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia.

Kata Kunci: Regionalisme, Partisipasi, Pemangku Kepentingan, Masyarakat ASEAN, Asia Tenggara, Organisasi Masyarakat Sipil, Usaha Kecil & Menengah

DDC: 320.014

Sandy Nur Ikfal Raharjo

KETAHANAN SOSIAL WARGA PERBATASAN INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: STUDI DI KECAMATAN ENTIKONG, KALIMANTAN BARAT

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 53-68

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015, dan akan ditransformasikan menjadi MEA yang inklusif pada tahun 2025. Sebagai penduduk kawasan perbatasan yang pintu gerbang lintas batas Indonesia-Malaysia, masyarakat Entikong harus memiliki ketahanan sosial yang kuat untuk menghadapi semakin bebasnya pergerakan orang dan barang di wilayah mereka. Tulisan ini mengkaji kondisi ketahanan sosial masyarakat Entikong dalam menghadapi MEA tersebut. Dengan menggunakan kerangka Sustainable Livelihood Approach yang dimodifikasi, tulisan ini mengidentifikasi bahwa masyarakat Entikong memiliki empat modal ketahanan sosial yang kuat, yaitu modal alam, modal sosial, modal keuangan, dan modal politik/pemerintahan, serta dua modal yang masih lemah, yaitu modal fisik dan modal manusia. Selain itu, ketahanan sosial masyarakat Entikong juga dibantu dengan pelaksanaan kerja sama lintas Indonesia-Malaysia. Tulisan ini menyarankan reoptimalisasi kerja sama lintas batas dan pengaturan khusus perdagangan lintas batas di dalam MEA.

Kata Kunci: Entikong, ketahanan sosial, kerja sama lintas batas, Masyarakat Ekonomi ASEAN

DDC: 320.014

Ikrar Nusa Bhakti, Diandra Mengko

**INTELIJEN DALAM PUSARAN
DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA
ORDE BARU**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 69-82

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul “Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”. Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

Kata Kunci : Demokrasi, Intelijen, Indonesia, Politik, Pasca Orde-Baru

DDC: 352.14

Awani Irewati

**PROBLEMATIKA KERJA SAMA
PERBATASAN SEPANJANG SUNGAI
MEKONG ANTARA TIONGKOK DAN
ASEAN BAGIAN UTARA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 83-104

Selama berabad-abad, sungai Mekong telah menjadi pusat kehidupan orang enam negara riparian ini. Secara geografis, mengalir melalui negara-negara tersebut untuk sekitar 4.900 km. Ini menciptakan sebuah DAS 795.000 km², didistribusikan antara Upper Mekong River Basin yang terbentuk oleh China (21 persen) dan Myanmar (3 persen), serta Lower Mekong River Basin, yang terdiri Laos (25 persen), Thailand (23 persen), Kamboja (20 persen), dan Viet Nam (8 persen) (FAO, 2011). Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang mereka sendiri di atas Sungai Mekong dan sub regional yang, negara-negara riparian telah mengembangkan beberapa inisiatif kerjasama lintas batas di antara mereka. Greater Mekong Subregion (GMS), Mekong Ricer Komisi [MRC] dll adalah contoh dari kerjasama lintas batas. Selain itu, ada beberapa kerjasama lain yang mencakup seluruh atau sebagian dari sub regional Mekong tetapi tidak secara khusus fokus pada Mekong River, yaitu ASEAN-China Free Trade Area dan Komunitas ASEAN. Kondisi ini menciptakan kompleksitas hubungan antara kerjasama di sub regional Mekong. Analisis tulisan ini beberapa potensi/masalah yang ada yaitu kemungkinan bahwa mereka kerjasama tumpang tindih; perbedaan profil negara-negara ‘tampaknya membuat kepentingan yang berbeda di antara mereka dll Analisis tersebut didasarkan pada beberapa penelitian lapangan di beberapa tempat (Vietnam, Laos, Thailand) pada tahun 2015.

Kata kunci: kerjasama lintas batas, negara-negara ASEAN Utara, RUPS, MRC, Sungai Mekong, konektivitas.

DDC: 352.14

Khanisa

**STRATEGI PENINGKATAN
PEMAHAMAN MASYARAKAT
TENTANG MASYARAKAT EKONOMI
ASEAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 105-118

ASEAN tengah merubah pendekatan institusinya dari top-to-bottom ke cara yang lebih memasyarakat. Penciptaan sebuah komunitas mendorong ASEAN untuk bersikap

lebih inklusif dalam implementasi program-programnya. Dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, kesadaran dan pemahaman publik adalah faktor kunci yang menentukan apakah pillar ini akan dapat direalisasikan dengan sukses. Mengingat popularitas dari ASEAN dan kerangka-kerangkanya tidak diketahui secara signifikan di Indonesia, survei dan policy paper yang kemudian diterbitkan bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mulai di terapkan tahun lalu.

Kata Kunci : ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia, Survei Publik.

DDC: 320.014

Nanto Sriyanto

**NEOTRADISIONALISME DAN
DISTOPIANISME: TINJAUAN ATAS
TIGA BUKU ROBERT D. KAPLAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 119-136

Artikel ini bertujuan menganalisa tulisan Robert D. Kaplan terutama yang terungkap dalam tiga publikasinya yaitu *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War* (New York: Vintage Books. 2000), *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate* (New York: Random House Publishing. 2013), dan *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific* (New York: Random House. 2014). Robert D. Kaplan dengan pendekatan geopolitik dan berlatar belakang sebagai wartawan yang mengalami langsung sejumlah perubahan penting pasca-Perang Dingin membawa pesan tentang negaran gagal yang mengancam stabilitas global, utamanya negara-negara maju (2000), kebangkitan pemikiran klasik geopolitik dalam dunia yang semakin padat dengan kekuatan yang terpolarisasi (2013), dan implikasinya terhadap kawasan Asia Timur sebagai kawasan yang rawan konflik. Dari ketiga publikasi Kaplan tersebut, penulis melihat pesan senada yang berwujud dalam bentuk bangkitnya pemikiran neotradisionalisme realis dalam hubungan internasional dan distopianisme. Di lain pihak, penulis juga melihat kekurangan dalam uraiannya yang populer dan menarik minat banyak pembaca dari kalangan luas, baik akademisi, aktivis LSM, bahkan pengambil keputusan, Kaplan terbilang tidak cukup mengupas

posisi teoritisnya dibandingkan teori yang ada yang menjadi diskursus akademik. Alih-alih memunculkan paparan yang holistik sebagaimana ia sebagai pengamat lapangan dan travel journalist menempatkan diri dalam setiap publikasinya, tulisan Kaplan harus dikritisi secara akademik karena tidak cukup utuh memberikan pandangan sebagaimana klaimnya yang banyak diungkap.

Kata Kunci: Robert D. Kaplan, geopolitik, realis neotradisionalisme, holistik, travel journalist

DDC: 324.2598

**David Putra Setyawan, Arwin Datumaya
Wahyudi Sumari**

**INDONESIA DEFENSE DIPLOMACY
IN ACHIEVING CYBERSECURITY
THROUGH ASEAN REGIONAL FORUM
ON CYBERSECURITY INITIATIVES**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 1-20

The development of information technology in the international world impacts to the use of cyberspace which covers all aspects of national life. Faced to this condition, Indonesian government needs to understand the state of cyber security and build it so that able to address any kind of threat which comes through cyberspace. In addition to internal conditions, the scope of the external noteworthy to be considered due the nature of cyber threats are transnational, cross the line of sovereignty, and has been seen as a common threat by the countries of the world. ASEAN has become a forum for Indonesia's to achieve national interests in order to support national security in the cyber field. Through the ASEAN Regional Forum (ARF) on cybersecurity initiatives, defense diplomacy strategy directed to increasing mutual trust (confidence building measures) between states and reduce any potential threats that may result from the external sphere. Those efforts, resulted in an agreement in the form of point of contacts between states and a shared vision for continuous training of cybersecurity in the form of seminars and workshops to build the capacity of human resources. Strategies and efforts are analyzed through a qualitative approach and primary data were collected through interviews with 15 informants from various government

agencies. In addition, literature, journals, and related documents are also used as supporting data.

Key Words: *ARF, confidence building measures, cybersecurity, defense diplomacy*

DDC: 324.2598

Fathimah Fildzah Izzati

**THE "MASS LAYOFFS":
ELECTRONICS INDUSTRY VALUE
CHAIN, AEC, AND CHALLENGES FOR
LABOUR MOVEMENT IN INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 21-32

"Mass layoffs" issue has been rising in labour's political discourse in Indonesia since early 2016, following the announcement of economic policy package to face the Asean Economic Community (AEC). However, the word "mass" constructed in the issue goes against the employment data and is more closely related to political interests related to production in the electronics industry. On the other hand, labour movement issue in the electronics sector is also emerging along with the increase of labour market flexibility in this free market era, including the context of AEC. This study discusses the relationship between the mass layoffs issue, the implementation of AEC, and the labour movement in Indonesia, as well as the value chain of the electronics industry on the global level. It aims to show the role of labour movement in facing an economic scheme like AEC especially in electronics industry using value chain theory analysis. By using qualitative approach and literature review, the study found

that the labour movement in Indonesia has an excellent opportunity to build strength at the regional level by positioning themselves in the global value chain and flexible labour market regime.

Keywords: Mass layoffs, Value Chain, Electronics Industry, Labor Market Flexibility, AEC, Labour Movement.

DDC: 320.014

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

**SPACE TRANSFORMATION AND
STAKEHOLDERS PARTICIPATION:
UNDERSTANDING INVOLVEMENTS
OF INDONESIAN CIVIL SOCIETY
ORGANISATIONS AND SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES IN POST-2003
REGIONALISM IN ASEAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 33-52

This article aims to explain the participation of stakeholders in the making of ASEAN Community after the regional political-economic transformation in 2003. The establishment of ASEAN Community, which is based on three pillars (politics & security, economics, social and cultural) has led to a more complex interactions between actors in the region. Before 2003, ASEAN has been perceived only as an 'international organisation', which is centered around the 'member states' as the only influential actor in the region. Following the establishment of ASEAN Community as a new form of regionalism in 2003, this article argues that the newly-established regional community has opened up spaces for contestations between the state and other new actors in the region, most notably business actors (both big businesses and small-and-medium enterprises) and civil society organisations. Drawn upon the critical perspective, this article argues that emerging interactions between actors in the region has been enabled by the transformation of space structure in ASEAN, that opened up spaces for contestations between stakeholders in the newly-transformed regional organisation. It thus leads to the more complex understanding of regionalism in Southeast Asia. The arguments provided will also be assessed by two case studies on the regionalisation of Human

Rights NGOs and Small-and-Medium Enterprises in Indonesia.

Keywords: regionalism, participation, stakeholders, ASEAN community, southeast asia, non-government organisations, small-and-medium enterprises.

DDC: 320.014

Sandy Nur Ikfal Raharjo

**THE SOCIAL RESILIENCE OF
INDONESIAN BORDER AREA
RESIDENTS TOWARDS THE ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY:
A STUDY IN ENTIKONG SUBDISTRICT,
WEST KALIMANTAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 53-68

ASEAN Economic Community (AEC) was formally come into force at the end of 2015, and will be further transformed to be more inclusive by 2025. To deal with this issue, the residents of Entikong subdistrict at the Indonesia-Malaysia borderland should have a strong social resilience. This article explain the author's work on the social resilience assessment of the Entikong residents towards the AEC implementation. By using a modified Sustainable Livelihood Approach, the result shows that Entikong residents have four adequate social resilience assets, namely natural capital, social capital, financial capital, and political capital. Unfortunately, they are still weak on physical and human capitals. This work also shows that cross-border cooperation implementation gives positive effects to the residents. For recommendation, cross-border cooperation should be re-optimized and a special treatment of border trade in AEC should be arranged.

Keywords: Entikong, Social Resilience, Cross-border Cooperation, ASEAN Economic Community.

DDC: 320.014

Ikrar Nusa Bhakti, Diandra Mengko

***INTELLIGENCE AND
DEMOCRATIZATION IN INDONESIA
POST NEW-ORDER***

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 69-82

Intelligence is an important and also complicated topic to study and understand because of its nature of secrecy. However, democracy always pushes the people to have at least basic comprehension of all government agencies, including the world of intelligence. Along with that spirit, Center for Political Studies, Indonesian Institute of Sciences (P2P-LIPI) was conducting research entitled "Intelligence and Democratization in Indonesia Post New-Order" in 2015. This research not only discuss about intelligence theories, but also intelligence experience in transitional democracy states, brief history of Indonesian intelligence, and initial review on democratization of intelligence in Indonesia. We argue that intelligence reform in Indonesia is a requisite. Intelligence should operate under democratic system and principles. Oversight mechanism would not weaken intelligence role -in contrast, it would enhance intelligence professionalism by gaining public support, legitimacy, and adequate budget.

Keywords: *Democracy, Intelligence, Indonesia, Politics, Post New-Order*

DDC: 352.14

Awani Irewati

***PROBLEMATIC BORDER COOPERATION
ALONG THE MEKONG RIVER BETWEEN
CHINA AND ASEAN NORTHERN***

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 83-104

For centuries, the Mekong river has become the center of six riparian countries's people life. Geographically, it flows through these countries for about 4,900 km. It created a 795,000 km² river basin, distributed between the Upper Mekong River Basin that is formed by China (21 percent) and Myanmar (3 percent), as well as the Lower Mekong River Basin, which comprised Laos (25 percent), Thailand (23 percent), Cambodia (20 percent), and Viet Nam (8 percent) (FAO, 2011). To fulfill their own people's needs over the Mekong River and its subregion, those riparian states have been developing some transboundary cooperation initiatives among them. Greater Mekong Subregion (GMS), Mekong Ricer Commission [MRC] etc. are examples of the transboundary cooperation. Besides, there are some other cooperations that cover the whole or part of the Mekong subregion but do not specifically focus on Mekong River; i.e. ASEAN-China Free Trade Area and ASEAN Community. This condition creates a complexity of relationships among the cooperations in the Mekong subregion. This paper analysis some potential/existing problems i.e. a possibility that those cooperations overlap; the differences in the countries' profile seem to create different interests among them etc. The analysis is based on some field research in some places [Vietnam, Laos, Thailand] in 2015.

Keywords: *transboundary cooperation, Northern ASEAN countries, GMS, MRC, Mekong River, connectivity.*

DDC: 352.14

Khanisa

***STRATEGY TO INCREASE PUBLIC
UNDERSTANDINGS ABOUT ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY***

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 105-118

ASEAN is gradually changing their approach from top-to-bottom to a more grassroots style institution. The idea of creating a community push ASEAN to be more inclusive in implementing its programmes. In realizing ASEAN Economic Community, public awareness and undertsndings is the key factor in whether the implementation of this ASEAN's pillar will succeed. Recalling that the popularity of

ASEAN and its frameworks are not significantly known in Indonesia, the survey and the policy paper that followed aim to find out the level of public understandings about ASEAN Economic Community which started to be implemented last year.

Keywords: ASEAN, ASEAN Economic Community, Indonesia, public survey.

DDC: 320.014

Nanto Sriyanto

**NEOTRADISIONALISME DAN
DISTOPIANISME: REVIEW FOR THREE
BOOKS OF ROBERT D. KAPLAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 119-136

*This article is to analyze three publications of Robert D. Kaplan, which consist of *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War* (New York: Vintage Books. 2000), *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate* (New York: Random House Publishing. 2013), and *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific* (New York: Random House. 2014). In those three publications, Kaplan utilizes geopolitical approach and embedded journalism in examining turbulent world in post-Cold War era. His arguments contain in the three books could be summarized as follows: failed states has threatened the stability the world, especially the prosperous developed countries (2000), resurgent of classical geopolitical thinking on tackling shrinking space yet polarized world politics (2013), implication on East Asia region as the volatile zone prone to conflict in the future. Based on the three publications, it could be seen that Kaplan is a proponent of neotraditional realism in IR studies, and it brings about dystopian thesis in those publications. Nevertheless it is discernible to note that despite his prosaic nature in almost of his writings that has attracted wider readership spread from academics, NGO's activists, and decision*

maker, Kaplan has not given enough space to discuss his theoretical position before he comes up with single theoretical perspective. Therefore, instead of giving a holistic picture about his subject in those three publications, his arguments and thesis which he claims based on embedded journalism and field observation should be criticised due to imbalance description and short-sighted conclusion.

Key Words: Robert D. Kaplan, geopolitic, neotradisionalism realist, holistic, travel journalist

RESUME PENELITIAN
PROBLEMATIKA KERJA SAMA PERBATASAN SEPANJANG SUNGAI
MEKONG ANTARA TIONGKOK DAN ASEAN BAGIAN UTARA

RESEARCH SUMMARY
THE PROBLEM OF BORDER COOPERATION ALONG THE MEKONG
RIVER AND NORTHERN ASEAN COUNTRIES

**Awani Irewati, Agus R. Rahman, CPF Luhulima, Tri Nuke Pudjiastuti,
Sandy Nur Ikfal Raharjo, Hayati Nufus**

Pusat Penelitian Politik
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI)
e-mail: irewatiawani@yahoo.co.id

Diterima: 24 Mei 2016; direvisi: 20 Juni 2016; disetujui: 28 Juli 2016

Abstract

For centuries, the Mekong river has become the center of six riparian countries's people life. Geographically, it flows through these countries for about 4,900 km. It created a 795,000 km² river basin, distributed between the Upper Mekong River Basin that is formed by China (21 percent) and Myanmar (3 percent), as well as the Lower Mekong River Basin, which comprised Laos (25 percent), Thailand (23 percent), Cambodia (20 percent), and Viet Nam (8 percent) (FAO, 2011). To fulfill their own people's needs over the Mekong River and its subregion, those riparian states have been developing some transboundary cooperation initiatives among them. Greater Mekong Subregion (GMS), Mekong River Commission [MRC] etc. are examples of the transboundary cooperation. Besides, there are some other cooperations that cover the whole or part of the Mekong subregion but do not specifically focus on Mekong River; i.e. ASEAN-China Free Trade Area and ASEAN Community. This condition creates a complexity of relationships among the cooperations in the Mekong subregion. This paper analysis some potential/existing problems i.e. a possibility that those cooperations overlap; the differences in the countries' profile seem to create different interests among them etc. The analysis is based on some field research in some places [Vietnam, Laos, Thailand] in 2015.

Keywords: *Transboundary cooperation, Northern ASEAN countries, GMS, MRC, Mekong River, connectivity.*

Abstrak

Selama berabad-abad, Sungai Mekong telah menjadi pusat kehidupan bagi masyarakat yang ada di enam negara tepian sungai, yaitu: Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, dan Tiongkok. Secara geografis, sungai ini mengalir melalui negara-negara tersebut sejauh 4.900 km. Sungai Mekong menciptakan Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 795.000 km² yang terdistribusi antara Uper Mekong River Basin, yang terbentuk oleh Tiongkok (21%) dan Myanmar (3%), serta Lower Mekong River Basin, yang terdiri Laos (25%), Thailand (23%), Kamboja (20%), dan Viet Nam (8%) (FAO, 2011). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Sungai Mekong serta subkawasannya, negara-negara tepi Sungai Mekong telah mengembangkan beberapa inisiatif kerja sama lintas batas di antara mereka. Greater Mekong Subregion (GMS) dan Mekong River Commission [MRC] adalah contoh dari kerja sama lintas batas yang sudah terjalin di antara negara tepi Sungai Mekong. Selain itu, juga ada beberapa

kerja sama lain yang mencakup seluruh atau sebagian dari subkawasan Mekong, tetapi tidak secara khusus fokus pada Sungai Mekong, yaitu ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan Komunitas ASEAN. Kondisi ini menciptakan kompleksitas hubungan antara kerja sama di subkawasan Sungai Mekong. Tulisan ini menganalisis beberapa masalah yang ada ataupun potensi masalah yang mungkin muncul akibat kompleksitas kerja sama di subkawasan tersebut, seperti kemungkinan adanya tumpang tindih kerja sama; serta perbedaan kepentingan masing-masing negara tepi Sungai Mekong yang muncul akibat adanya perbedaan profil negara-negara tersebut. Analisis dalam tulisan ini disusun berdasarkan pada penelitian lapangan di beberapa tempat, yaitu: Vietnam, Laos, dan Thailand pada tahun 2015.

Kata kunci: kerja sama lintas batas, negara-negara ASEAN bagian utara, GMS, MRC, Sungai Mekong, konektivitas.

1. Pendahuluan

Dalam mewujudkan Komunitas ASEAN di kawasan Asia Tenggara, membangun keterhubungan (*connectivity*) antarnegara anggota menjadi sebuah keharusan. Keterhubungan kawasan dibangun melalui keterhubungan fisik (*physical connectivity*), keterhubungan kelembagaan (*institutional connectivity*), dan keterhubungan antarmasyarakat (*people-to-people connectivity*). Dengan adanya keterhubungan ini, diharapkan tercipta ASEAN yang lebih kompetitif dan tangguh.¹

Sudah ada *Master Plan on ASEAN Connectivity* yang intinya menekankan pentingnya mengintensifkan dan menguatkan hubungan dengan mitra dari luar. Dalam dokumen itu, disebutkan “*ASEAN will further strengthen partnership with external partners, including dialogue partners, multilateral development banks, international organizations and others for effective and efficient implementation of the Master Plan*”.² Hal ini menyiratkan bahwa selain diperlukan pembangunan keterhubungan di dalam kawasan, diperlukan juga pembangunan keterhubungan ASEAN dengan wilayah lain di luar Asia Tenggara (*kesalingterhubungan/interconnectivity*).

Salah satu media yang dapat digunakan untuk membangun kesalingterhubungan adalah kerja sama perbatasan. Aspek perbatasan penting untuk dijadikan fokus kerja sama mengingat selama ini kendala-kendala yang

dihadapi dalam implementasi pembangunan keterhubungan terkait dengan masalah-masalah lintas batas seperti migrasi ilegal, degradasi lingkungan, kejahatan transnasional, dan lain-lain.³ Selain itu, kerja sama perbatasan juga bisa dipakai sebagai media pengelolaan sengketa perbatasan. Kerja sama perbatasan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menghilangkan hambatan fisik dan psikologis, sehingga memperkuat kesejahteraan sosial-ekonomi menuju integrasi wilayah.⁴

Aliran Sungai Mekong sepanjang 4.900 km dari Tibet hingga Vietnam dan bermuara di Laut China Selatan menjadi penghubung 5 negara ASEAN bagian utara yang terdiri dari Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Thailand, dengan Tiongkok (Peta 1). Sungai Mekong tidak hanya memiliki fungsi sebagai penanda batas wilayah di antara negara-negara ini, namun juga berpeluang untuk pengembangan kerja sama dalam pengelolaan perbatasan sesuai kepentingan masing-masing. Berbagai kerja sama pengelolaan Sungai Mekong dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan di subregional ini.

¹ The ASEAN Secretariat. *Master Plan on ASEAN Connectivity*. Hlm. i, Diakses dari <http://www.asean.org/images/2012/publications/Master%20Plan%20on%20ASEAN%20Connectivity.pdf> pada 3 Maret 2015.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. ii.

⁴ Lee Sangsoodan Alec Forss. *Dispute resolution and cross-border cooperation in northeast Asia: Reflections on the nordic experience (Asia Paper)*. Stockholm: Institute for Security and Development Policy, 2011.



Sumber: "Is China's Need for Power a threat to the Greater Mekong Subregion" diakses dari <http://www.chiangraitimes.com/is-chinas-need-for-power-a-threat-to-the-greater-mekong-subregion.html> pada 20 Januari 2016. Keterangan: Garis panjang berwarna biru menunjukkan aliran Sungai Mekong

Peta 1. Aliran Sungai Mekong yang melewati Tiongkok dan Negara-Negara ASEAN bagian Utara

Salah satu bentuk kerja sama awal terkait dengan penjagaan keseimbangan dan pengelolaan sumber daya air di Sungai Mekong adalah *Mekong Committe*. Negara-negara yang berada di hilir Sungai Mekong, yaitu: Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam membentuk kerja sama di wilayah *Mekong River Basin* membentuk *Mekong River Commission* [MRC] di tahun 1995. Tujuan utama dari kerja sama ini pada pengaturan suplai air Sungai Mekong, yang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat *riparian states* [negara-negara tepi Sungai Mekong]. Dengan potensi besar yang dimilikinya, Sungai Mekong menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang ada di sekitar sungai. Aliran sungai ini banyak dimanfaatkan untuk pertanian dan perikanan. Contohnya Vietnam, yang bergantung pada sungai ini sebesar 70% untuk mengairi lahan-lahan pertaniannya.⁵

Namun, di sisi lain, upaya menjaga sumber daya alam di Sungai Mekong berhadapan dengan kepentingan negara lain di subkawasan

ini. Salah satu negara yang terlihat aktif dalam pembangunan bendungan besar di Sungai Mekong adalah Tiongkok. Pembangunan bendungan-bendungan besar menjadi salah satu penyebab menurunnya debit air Sungai Mekong yang bisa memicu terjadinya kerusakan ekologi disekitar sungai. Meskipun bukan hanya Tiongkok saja yang berkepentingan atas pembangunan *hydropower* di sungai, Laos juga berkepentingan dalam membangun bendungan di wilayahnya.

MRC seharusnya mampu menjadi wadah bagi negara-negara Sungai Mekong untuk mengontrol penggunaan sumber daya alam di Sungai Mekong. Akan tetapi, kerja sama ini justru nampaknya semakin menunjukkan satu kepentingan meruncing antara anggota MRC dengan Tiongkok. Tiongkok sebagai negara dengan perkembangan ekonomi yang paling besar di subkawasan tersebut semakin mendominasi pengelolaan area hulu Sungai Mekong dan menolak untuk menjadi anggota MRC. Hingga saat ini, posisi Tiongkok di dalam MRC hanya sebagai "dialogue partner". Dengan perannya sebagai mitra dialog ini membuat MRC tidak memiliki kekuatan untuk meredam aktivitas-aktivitas yang dilakukan Tiongkok terkait dengan pengelolaan Sungai Mekong.

Selain MRC, negara-negara di sekitar Sungai Mekong juga membentuk kerja sama lain, yaitu *Greater Mekong Subregion* (GMS). Pembangunan keterhubungan di dalam subkawasan menjadi perhatian utama di dalam kerja sama ini. Hal ini ditunjukkan dengan pembangunan koridor-koridor ekonomi yang menjadi penghubung di antara negara-negara Sungai Mekong. Ada sembilan koridor yang rencananya akan dibangun dalam kerangka kerja sama GMS. Koridor-koridor ekonomi yang sudah dibentuk di antaranya yaitu *East West Economic Corridor*; *North South Economic Corridor*; *Southwest Economic Corridor*.

Awalnya, pembentukan GMS pada tahun 1992 diutamakan untuk membangun ekonomi negara-negara disekitar Sungai Mekong. Salah satu faktor utama yang mendorong negara-negara ditepi sungai (*riparian states*) bergabung dalam kerja sama GMS antara lain dorongan domestik untuk memajukan pembangunan

⁵ Wawancara Tim Perbatasan dengan *Institute of Southeast Asia Studies, Vietnam Academic of Social Science*, pada tanggal 22 September 2015, pukul 14.00-17.00 di Hanoi, Vietnam.

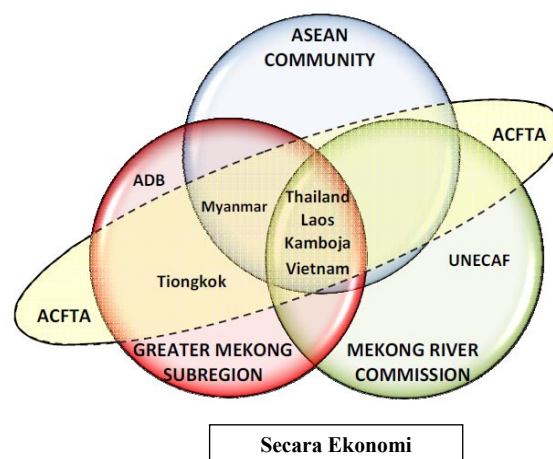
ekonomi masing-masing melalui manfaat yang bisa diraih dalam GMS. Di sisi lain, Tiongkok juga memiliki kepentingan besar di GMS guna membangun jaringan kepentingan ekonominya di wilayah Sungai Mekong.

Selain GMS dan MRC, masih ada pula kerja sama lainnya yang menjadikan Sungai Mekong sebagai objeknya maupun kerja sama yang melibatkan sebagian atau seluruh negara-negara anggota GMS. Contoh kerja sama yang diprakarsai oleh negara di dalam subkawasan Mekong sendiri adalah ACMECS (*Ayeyawady-Chao Phraya- Mekong Economic Cooperation Strategy*). Kerja sama ini diprakarsai oleh Thailand dan mengikutsertakan seluruh negara ASEAN bagian utara.

Munculnya beberapa kerja sama di kawasan Sungai Mekong menunjukkan betapa besar dan pentingnya makna geostrategis dari subkawasan Sungai Mekong ini. Dilihat dari sisi ASEAN, beberapa kerja sama itu justru memiliki tujuan untuk ikut mengurangi kesenjangan di dalam pembangunan ekonomi antara negara-negara ASEAN lama dengan negara-negara ASEAN baru yang mayoritas berada di bagian utara (Cambodia, Myanmar, Laos, Viet Nam/CMLV).⁶

Di dalam ASEAN sendiri juga ada kerja sama *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) yang melibatkan seluruh negara ASEAN dan Tiongkok. ASEAN juga memiliki Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) yang didalannya termasuk negara-negara ASEAN bagian utara. Dikhawatirkan bisa terjadi tumpang tindih peran antar-kerja sama itu.

Bila dikaitkan dengan kerja sama perbatasan GMS, MRC, ACFTA, dan Komunitas ASEAN yang dibahas dalam penelitian ini, maka kompleksitas kerja sama perbatasan tersebut dari aspek ekonomi dan politik-keamanan dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Dibuat oleh tim perbatasan tahun 2015

Bagan 1. Kompleksitas Kerja Sama Perbatasan antara Tiongkok dengan ASEAN bagian Utara

Bagan ini menunjukkan bagaimana hipotesis hubungan dan atau irisan secara ekonomi antarakerja sama *Greater Mekong Subregion/ GMS* dengan kerja sama-kerja sama lainnya. *Pertama*, Kerja sama GMS bersinggungan dengan Komunitas ASEAN karena lima negara anggota GMS juga merupakan negara anggota ASEAN. GMS juga bersinggungan dengan *Mekong River Commission/MRC* karena keempat negara anggota MRC juga merupakan negara anggota GMS. Selain itu, GMS juga bersinggungan dengan ACFTA, terutama dalam bidang perdagangan, karena semua negara anggota GMS juga terlibat di dalam ACFTA.

Konteks Sungai Mekong menjadi lebih menarik karena ada keterlibatan Tiongkok sebagai negara di luar ASEAN yang mempunyai kekuatan relatif lebih besar di banding negara-negara lainnya, sehingga memiliki pengaruh yang kuat dalam dinamika kerja sama perbatasan di Sungai Mekong. Apabila masalah perbatasan di antara negara-negara tersebut tidak dikelola dengan baik, tentu dapat memicu timbulnya konflik yang akan mempengaruhi kerja sama ekonomi dan kestabilan di sekitar kawasan. Untuk itu, secara geo-politik, negara-negara di sekitar Sungai Mekong sangat perlu mengelola masing-masing wilayahnya yang saling berbatasan, dan membentuk kerja sama yang baik demi meredam kemungkinan terjadinya konflik kawasan.

6

Penulisan ringkasan penelitian ini mengemukakan beberapa pertanyaan seperti apa perbedaan antara kerja sama *Greater Mekong Subregion* dengan kerja sama *Mekong River Commission*?; Apa kepentingan lima negara ASEAN bagian utara dan Tiongkok terhadap subkawasan Mekong?; Bagaimana upaya lima negara ASEAN bagian utara dan Tiongkok memperjuangkan kepentingannya di dalam kerja sama-kerja sama subkawasan Mekong?; Seberapa jauh sinergi antara *Great Mekong Subregion* dan kerja sama subkawasan Mekong lainnya dengan ASEAN?

2. Pemahaman Konsep

2.1 Kesalingterhubungan

(Interconnectivity)

Menurut Fenger dan Bekkers, kesalingterhubungan (*interconnectivity*) merujuk pada kondisi saling bergantung dan saling mempengaruhi (*mutual influencing*) antara bagian-bagian yang relatif otonom di dalam sebuah sistem yang spesifik. Pengertian dari keterhubungan antarsistem, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah hasil dari satu sistem dapat mempengaruhi dinamika dalam sistem yang lain. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kesalingterhubungan dapat pula disebabkan oleh aktor-aktor yang secara spontan beradaptasi/menyesuaikan perilaku mereka karena kejadian yang terjadi di sistem lain.

Ada beberapa tren penting yang menciptakan kesalingterhubungan dalam masyarakat modern. *Pertama*, internasionalisasi kegiatan, baik ekonomi, keuangan, politik, maupun budaya. Maksudnya adalah, pembangunan di dalam suatu negara atau suatu kawasan menjadi penting bagi pembangunan di negara atau kawasan lain. Hal ini juga berarti bahwa para aktor/negara merasa semakin membutuhkan adanya koordinasi di tingkat internasional. *Kedua*, informatisasi dalam masyarakat, di mana setiap orang/aktor dapat mengetahui kejadian dan pembangunan di tempat lain dan dapat menyesuaikan perilakunya dengan kejadian itu. Hal ini tidak lepas dari peran media dan internet yang dengan cepat memberitakan kejadian di satu tempat ke seluruh dunia.

Ketiga, perkembangan teknologi yang memungkinkan adanya pembagian kerja secara detail dan saling tukar informasi, material, dan energi. *Keempat*, tren spesialisasi dan diferensiasi yang meningkatkan keinginan untuk koordinasi dan integrasi dalam level rantai, jaringan, atau proses. *Kelima*, tren sosiologis dalam perkembangan jaringan, di mana jaringan tidak hanya semakin meluas, tetapi juga semakin bervariasi yang membuat peluang salingterhubung menjadi lebih besar. *Keenam*, tren yang melatarbelakangi perkembangan jaringan yang kompleks di mana persebaran sumber daya-sumber daya antaraktor yang memiliki nilai yang juga berbeda memicu semakin meningkatnya interdependensi yang rumit/kompleks. *Ketujuh*, tekanan yang semakin meningkat terhadap ruang yang tersedia menyebabkan peningkatan kesalingterjalanan fungsi-fungsi spasial dan kompetisi pada distribusi ruang yang langka. Pada akhirnya, kesalingterhubungan akan menciptakan proses yang simultan.⁷

Sejalan dengan pendapat di atas tetapi dalam konteks yang lebih spesifik, Alexander Betts mengemukakan bahwa isu-isu yang berkembang dalam hubungan internasional umumnya terhubung oleh struktur kelembagaan, dan diterima oleh para pembuat kebijakan dan aktor politik lainnya sebagai sesuatu yang saling terhubung dengan cara yang beragam. Menurutnya, ada dua jenis kesalingterhubungan area-area isu dalam pemerintahan global. *Pertama*, *embeddedness* (keterikatan), yaitu hubungan struktural antara area-area isu yang memang sudah ada. *Kedua*, *linkages* (keterkaitan), yaitu penciptaan hubungan antara area-area isu melalui proses tawar-menawar. Keterkaitan tersebut dapat dibangun melalui empat konsep utama, yaitu rezim, organisasi, ide, dan identitas.⁸ Dalam konteks kerja sama *Great Mekong Subregion* misalnya, kesalingterhubungan dibangun melalui rezim kerja sama yang memuat berbagai aturan yang mengikat negara anggotanya.

Sementara itu, dalam konteks dokumen *The Master Plan on ASEAN Connectivity*

⁷ *Ibid.*

⁸ Alexander Betts. "Conceptualising Interconnections in Global Governance: the Case of Refugee Protection". *RSC Working Paper Series* No.38. Oxford, University of Oxford, 2006.

2009, keterhubungan merujuk pada berbagai rencana aksi untuk menghubungkan (negara-negara anggota) ASEAN melalui tiga strategi. *Pertama*, pembangunan infrastruktur fisik (*physical connectivity*) melalui peningkatan infrastruktur yang sudah ada, pembangunan infrastruktur dan fasilitas logistik baru, harmonisasi kerangka peraturan yang ada, dan menumbuhkembangkan budaya inovasi. Adapun strategi ini dititikberatkan pada pembangunan sistem transportasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta kerangka keamanan energi regional.

Strategi *kedua* adalah pembangunan lembaga, mekanisme, dan proses yang efektif (*institutional connectivity*) yang dilakukan melalui penyelesaian berbagai hambatan dalam pergerakan barang dan orang, fasilitasi perdagangan dan investasi intra-ASEAN, harmonisasi prosedur yang standar dan seragam, serta operasionalisasi berbagai kesepakatan untuk mengurangi biaya pemindahan barang secara lintas batas. Selain itu, ASEAN juga harus secara progresif membuka diri untuk investasi, baik dari dalam ASEAN maupun dari luar kawasan.

Strategi *ketiga* yaitu pembangunan masyarakat yang terberdayakan (*people-to-people connectivity*) dalam rangka mempromosikan interaksi sosial dan budaya intra-ASEAN yang lebih dalam melalui upaya pembangunan komunitas, serta mempromosikan mobilitas intra-ASEAN yang lebih besar melalui relaksasi progresif terhadap persyaratan visa dan pembangunan *Mutual Recognition Arrangements* (MRAs). Untuk menjalankan tiga strategi ini, dibutuhkan sumber daya finansial dan mekanisme kelembagaan yang terkoordinasi. Dengan keterhubungan tersebut, diharapkan jaringan produksi dan distribusi di kawasan ASEAN akan semakin meluas dan mengakar di setiap simpul perekonomian Asia Timur dan global.

2.2 Kerja Sama Perbatasan

Kerja sama perbatasan atau dikenal dengan istilah *cross-border co-operation*, menurut Perkmann secara umum dapat didefinisikan sebagai kolaborasi yang terinstitusionalisasi antara otoritas-otoritas subnasional yang

melintasi batas negara.⁹ Sementara dalam konteks internasional, kerja sama perbatasan menurut Gerfert adalah salah satu bentuk dari kerja sama internasional yang dilakukan secara bilateral ataupun multilateral antarnegara atau antarkawasan, baik yang berbatasan langsung maupun yang tidak, untuk mencapai keuntungan atau tujuan bersama.¹⁰

Dalam menginisiasi kerja sama perbatasan, Gerfert mengemukakan bahwa ada dua strategi umum yang digunakan. *Pertama*, *top-down strategy*, yaitu kerja sama perbatasan yang diinisiasi oleh aktor-aktor tingkat atas, yang biasanya dilatarbelakangi oleh kepentingan keamanan dan stabilitas kawasan. *Kedua*, *bottom-up strategy*, yaitu kerja sama perbatasan yang diinisiasi aktor-aktor tingkat bawah yang dilatarbelakangi oleh masalah-masalah spesifik yang terjadi di wilayah perbatasan.¹¹ Untuk tahapan dalam pembangunan kerja sama perbatasan, Charles Ricq menawarkan 6 tahapan dalam pembangunan hubungan lintas batas, yaitu 1) *total lack of relation* (ketiadaan hubungan), 2) *information-exchange* (pertukaran informasi), 3) konsultasi (biasanya masih bersifat informal), 4) kerja sama (dicapainya kesepakatan), 5) harmonisasi (terhadap hukum dan peraturan), dan 6) integrasi.¹²

Lee dan Forss mengemukakan tiga bentuk kerja sama perbatasan. *Pertama*, pembentukan zona demiliterisasi dan zona netral. Kerja sama ini biasanya dipakai dalam rangka mencegah terjadinya pertempuran ketika terjadi konflik antarnegara. Militer dari negara-negara yang berkonflik dilarang untuk menjadikan zona tersebut sebagai sasaran atau medan pertempuran ketika terjadi konflik bersenjata. *Kedua*, ada bentuk kerja sama perbatasan berupa pembangunan taman perdamaian (*peace park*).

⁹ Markus Perkmann. "Cross-border Regions in Europe: Significance and Drivers of Regional Cross-Border Cooperation". Dalam *European Urban and Regional Studies* 10(2): 153–171.

¹⁰ Sonya Gerfert. *Cross-border Cooperation: Transforming Borders*. Diakses dari http://essay.utwente.nl/60149/1/BSc_S_Gerfert.pdf pada 4 Maret 2015.

¹¹ Sonya Gerfert, *Ibid*.

¹² Charles Ricq. *Handbook of Transfrontier Co-operation (2006 Edition)*. Geneva: Council of Europe, 2006.

Negara-negara yang terlibat dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat lintas batas, baik darat maupun maritim, sehingga memfasilitasi terciptanya perdamaian. Umumnya taman perdamaian ini menggabungkan beberapa tujuan seperti konservasi, pembangunan, sekaligus pencegahan konflik.

Bentuk kerja sama perbatasan yang *ketiga* adalah kerja sama ekonomi lintas-batas. Negara-negara yang terlibat dalam kerja sama ini dapat mengelola sumber daya lintas nasional secara bersama, misalnya melalui eksplorasi sumber daya alam, perdagangan lintas-batas, pembangunan kawasan industri, dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa kendala yang biasanya dihadapi ketika melaksanakan kerja sama ekonomi lintas-batas, misalnya perbedaan aturan dan struktur hukum, politik, serta administrasi yang berlaku di masing-masing negara. Kesulitan ini akan lebih tampak pada kerja sama pengelolaan sumber daya yang dianggap strategis seperti energi dan mineral karena berkait erat dengan kepentingan nasional masing-masing negara.¹³

Terkait dengan peranan kerja sama perbatasan, Lee dan Forss mengatakan bahwa kerja sama perbatasan dapat berperan untuk menghilangkan hambatan fisik dan psikologis, sehingga memperkuat kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat lokal menuju integrasi wilayah.¹⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat Charles Ricq bahwa tahapan akhir dari hubungan lintas batas seperti kerja sama perbatasan adalah integrasi.¹⁵

3. Hasil Penelitian

1.1 Kerja Sama *Mekong River Commission* dan Kerja Sama *Greater Mekong Subregion*: Makna dan Perbedaan

¹³ Sangsoo Lee dan Alec Forss. *Dispute resolution and cross-border cooperation in northeast Asia: Reflections on the nordic experience (Asia Paper)*. Stockholm: Institute for Security and Development Policy, 2011; serta Rongxing Guo, *Cross-border resource management: Theory and practice*. Amsterdam: Elsevier, 2005.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Charles Ricq, *Ibid.*

3.1.1 *The Mekong River Commission (1995–sekarang)*

Kerja sama *Mekong River Commission* yang dibentuk tahun 1995 berawal dari kerja sama yang sudah dibangun oleh 4 negara yaitu Thailand, Kamboja, Laos dan Vietnam, bernama *Mekong Committee* [1957] yang didukung PBB dibawah komisi ekonomi untuk Asia dan Timur Jauh (*the United Nations Economic Commission for Asia and the Far East/UNECAFE*). Summers menjelaskan tentang tujuan dari dibentuknya komite ini adalah sebagai wujud dari kesepakatan bersama untuk melakukan koordinasi atas pembangunan sumber air di antara negara-negara tepi terhadap aliran dan potensi Sungai Mekong.¹⁶

The Mekong River Commission (MRC) merupakan organisasi antar-pemerintah yang bekerja secara langsung dengan pemerintah Thailand, Kamboja, Lao PDR, dan Vietnam demi kepentingan bersama. Tujuan pokok dari MRC ini adalah mendorong kerja sama di semua bidang yang mencakup pembangunan berkelanjutan, kemanfaatan, manajemen dan konservasi air dan sumber-sumber yang terkait dengan keberadaan *Mekong River Basin* seperti irigasi, hydro power, kontrol banjir, perikanan, timber floating, turisme.¹⁷

Terbentuknya *the Greater Mekong Subregion*

Kerja sama *the Greater Mekong Subregion* adalah bentuk kegiatan antarpemerintah yang didasarkan pada program-program kerja sama ekonomi subregional yang terbentuk pada 1992. Adapun keanggotaannya terdiri dari 6 negara yang meliputi China, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Kegiatan *the Greater Mekong Subregion* (GMS) ini ditunjang oleh *Asian Development Bank* (ADB) yang menjalankan peran sebagai sekretariat bagi terlaksananya program.

Oleh karena itu, segala aktivitas GMS sangat bergantung pada dukungan kuat ADB. Selain sebagai sekretariat bagi GMS, ADB juga bisa

¹⁶ Tim Summers, "China and The Mekong Region", *China Perspective* 2008, No. 3, hlm. 69.

¹⁷ "Mekong River Commission", *Treaties and Alliances of the World*, edisi ke-8, London, John Harper Publishing, 2007.

berperan sebagai *a facilitator, financier, honest broker, technical adviser*.¹⁸ Orientasi kerja GMS berpijak pada integrasi ekonomi di kawasan, termasuk “cross border trade and investment”. Sehingga implementasi konsep “community”, “connectivity”, dan “competitiveness” antarnegara yang tercakup dalam GMS menjadi prioritas. Fokusnya bukan saja pada keberadaan Sungai Mekong, sebagaimana dalam MRC, tetapi lebih luas dari itu.

Tujuan GMS adalah membangun hubungan antarnegara melalui perbaikan infrastruktur, promosi perdagangan dan investasi, serta stimulasi pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapainya, GMS menyusun Kerangka Strategik GMS yang berfokus pada 5 poin, yaitu:¹⁹ 1) memperkuat hubungan infrastruktur (*strengthening infrastructure linkages*); 2) memfasilitasi perdagangan lintas batas, investasi dan turisme (*facilitating cross-border trade and investment, and tourism*); 3) meningkatkan kehadiran sektor swasta dan persaingan (*enhancing private sector participation and competitiveness*); 4) mengembangkan sumber daya manusia (*developing human resources*); 5) melindungi lingkungan dan menghimbau penggunaan berkelanjutan atas sumber-sumber alam bersama (*protecting the environment and promoting the sustainable use of shared natural resources*)

1.1.1 Perbedaan Umum antara MRC dan GMS

Dua bentuk kerja sama, *Mekong River Commission* (MRC) dan *Greater Mekong Subregion* (GMS) merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan negara-negara Mekong. Perbedaan yang paling mencolok dari keduanya adalah susunan keanggotaan, yang mana dua negara China dan Myanmar menjadi anggota GMS, tetapi tidak menjadi anggota MRC (kecuali hanya sebagai “dialog partner”).

Dalam GMS, isu yang diperjuangkan jauh lebih luas daripada yang diperjuangkan

¹⁸ ADB/ Evaluation Study, “Greater Mekong Subregion: Maturing and Moving Forward”, 2008, hlm. 1

¹⁹ ADB, *The Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program, Strategic Framework 2012-2022*, hlm.2

MRC. Fokus yang dibidik GMS tidak terkait masalah *flood control and water resource management* saja, tetapi lebih luas dari itu. Fokus GMS lebih pada pengembangan *integrated economic development* di subregional Mekong. Sedangkan MRC lebih menekankan pada *water resource management* sebagai upaya melanggengkan kebutuhan *riparian states* atas pemanfaatan sumber-sumber air Sungai Mekong secara bersama (*shared water resources*) dan berkelanjutan. Jadi MRC menggallang *common interests* antarnegara anggotanya berdasarkan kesadaran bersama bahwa semua kegiatan ekonomi, khususnya pembangunan industri yang terkait dengan Sungai Mekong harus mempertimbangkan dampak ekologi dan keseimbangan lingkungan.

MRC menghadapi dua kepentingan kontradiktif didalamnya. Di satu sisi, program-programnya selalu ditekankan pada pentingnya keseimbangan lingkungan dan ekologi. Sedangkan di lain sisi proyek-proyek yang dibangun di Sungai Mekong maupun di anak-anak sungainya (oleh Thailand, Laos) untuk kepentingan industri dan sumber energi seringkali menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang cukup besar, seperti masyarakat yang harus pindah dan kehilangan lahan pertanian, degradasi hasil ikan dan sebagainya. Sedangkan GMS relatif tidak terdapat saling tabrak kepentingan dalam program-programnya. Sekalipun ada dampak sosial yang dihasilkan, itu lebih mencerminkan dari masyarakatnya yang belum siap menyambut *integrated economy*.

1.1 Peran Tiongkok dalam *Greater Mekong Subregion*

Aliran Sungai Mekong yang mengalir di Tiongkok adalah sebesar 16% dari total panjang sungai secara keseluruhan, yang merupakan aliran terpanjang kedua setelah Laos. Posisi Tiongkok di bagian hulu Sungai Mekong membuat Tiongkok menjadi salah satu negara yang berkepentingan besar pada Sungai Mekong. Dalam rangka menyokong pembangunan ekonominya, Tiongkok membutuhkan pasokan energi yang cukup besar. Salah satu sumber penyuplai energi terbesar Tiongkok diperoleh

dari bendungan-bendungan yang merupakan pembangkit tenaga listrik berskala besar yang dibangun di Sungai Mekong.

Di satu sisi, keberadaan Sungai Mekong membawa keuntungan yang cukup besar bagi Tiongkok, namun, eksploitasi yang berlebihan pada akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan yang bisa berakibat bencana bagi Tiongkok ataupun negara-negara lain yang berlokasi di hilir sungai. Untuk itu, Tiongkok memiliki kewajiban untuk ikut menjaga dan mengelola Sungai Mekong.

Kerja sama yang digunakan oleh Tiongkok dalam rangka mengelola pemberdayaan Sungai Mekong adalah *Greater Mekong Subregion* (GMS). Kerja sama GMS merupakan mekanisme kerja sama regional pertama yang diikuti Tiongkok. Negara itu tidak saja merupakan sponsor utama kerja sama GMS, melainkan juga sebagai peserta utamanya. Keikutsertaannya ditandai dengan pelibatan Propinsi Yunnan sejak 1992 dan Daerah Otonom Guangxi Zhuang pada 2005.²⁰ Kerja sama yang dilakukan di bawah GMS lebih banyak berkisar pada pembangunan infrastruktur, perdagangan, investasi, peningkatan partisipasi sektor swasta dalam upaya peningkatan daya saing negara anggota, pengembangan keterampilan sumber daya manusia, dan perlindungan serta pemanfaatan berkelanjutan dari sumber daya alam yang ada di Sungai Mekong.

Pembangunan transportasi dan infrastruktur menjadi sektor-sektor yang mendapatkan perhatian lebih. Hal ini ditandai dengan adanya pembangunan jalan-jalan dan infrastruktur lain dalam rangka pembangunan koridor-koridor ekonomi yang menghubungkan negara-negara anggota GMS. Program GMS mencakup pula *Cross-Border Transport Agreement* (CBTA), yang merupakan instrumen GMS yang mencakup berbagai aspek fasilitasi transportasi lintas-batas: pemeriksaan bea cukai, gerak manusia lintas batas, standar desain jalan dan jembatan.²¹

²⁰ Mingjiang Li and Chong Guan Kwa, *China-Asean Sub-Regional Cooperation. Progress, Problems and Prospect*, Singapore: World Scientific Publishing, 2011

²¹ ADB Evaluation Study-Transport and Trade Facilitation in the Greater Mekong Subregion—Time to Shift Gears. Reference Number: SAP: REG 2008-86Sector Assistance Program Evaluation December 2008, hal. i, <http://www.oecd.org>.

GMS juga merupakan mekanisme kerja sama ekonomi regional yang paling penting antara Tiongkok dan ASEAN, sebelum keduanya setuju untuk bekerja sama menuju suatu wilayah perdagangan bebas melalui *ASEAN – China Free Trade Area* yang diberlakukan pada Januari 2010. Investasi Tiongkok di dalam Strategi Ekonomi GMS telah memperbaiki infrastruktur bagi transportasi komoditi, untuk sebagian juga melalui ADB GMS *Economic Corridors*, yang mencakup suatu jejaring lintasan yang menghubungkan semua negara GMS yang mencakup Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar dan Propinsi Yunan.

Keterlibatan Tiongkok di dalam GMS dapat dilihat sebagai strategi yang dilakukannya untuk menghubungkan jalan darat antara Tiongkok barat daya dan jazirah Indochina. Melalui GMS, Tiongkok juga bertujuan untuk mewujudkan pasar antara Tiongkok barat daya dan Asia Tenggara, memperkuat kerja sama ekonomi dan teknologi, membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, mengentaskan kemiskinan, membangun hubungan ekonomi yang saling menguntungkan, menarik perdagangan dan investasi internasional, sehingga dapat membangun hubungan yang stabil dan bersahabat antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara.

Berbeda dengan negara-negara anggota GMS lainnya, keterlibatan Tiongkok di dalam GMS diwakili oleh dua provinsi yang berada di bagian barat daya, yaitu Yunnan dan Daerah Otonomi Guangxi Zhuang. Dua provinsi ini berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN, seperti Vietnam, Laos, dan Myanmar, dan dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan Tiongkok dengan wilayah Asia Tenggara. Secara geografis, kedua wilayah ini memang tidak dapat dipisahkan dari kawasan GMS. Sungai Mekong mengalir wilayah Yunnan sepanjang 1.247 km²², sedangkan Guangxi secara langsung berbatasan darat dengan Vietnam sepanjang 1.020 km²³. Posisi Yunnan dan

<http://www.oecd.org/countries/mongolia/42228102.pdf>

²² Zhu Zhenming, *Mekong Development and China's (Yunnan) Participation in the Greater Mekong Subregion Cooperation*, *Ritsumeikan International Affairs* Vol. 8. 2010, hlm. 2

²³ RongxingGuo, *An Introduction to Chinese Economy: The*

Guangxi yang menjadi batas wilayah Tiongkok di bagian barat daya membuat dua provinsi ini menjadi provinsi strategis untuk Tiongkok dalam membangun keterhubungannya dengan negara-negara ASEAN.

Selain GMS, dua wilayah ini juga menjadi wilayah percobaan untuk pengimplementasian ACFTA. GMS dan ACFTA menjadi peluang besar bagi dua provinsi ini untuk mengembangkan ekonominya.²⁴ Yunnan sendiri mulanya adalah wilayah terbelakang dan termasuk provinsi yang miskin di Tiongkok dalam kurun waktu yang cukup lama.²⁵ Baru pada tahun 1992 Yunnan mengalami titik perubahan yang besar, yaitu ketika Tiongkok menerapkan kebijakan Reformasi dan Keterbukaan.²⁶

Keikutsertaan Yunnan dan Guangxi di dalam kerja sama regional untuk mewakili Tiongkok ini tentunya membuat adanya kebebasan yang lebih bagi pemerintah lokal provinsi untuk menjalin kerja sama dalam lingkup regional. Meskipun secara langsung keanggotaan Tiongkok di GMS diwakili oleh Yunnan dan Guangxi, namun pemerintah lokal dua provinsi tersebut tidak memiliki kekuatan atau hak untuk bernegosiasi atau menandatangani kerja sama dengan pemerintah pusat dari negara lain yang menjadi partner kerja samanya.²⁷ Keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah lokal ini kemudian menjadi tantangan sendiri bagi kerja sama Tiongkok di dalam GMS. Diperlukan adanya mekanisme koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal Tiongkok agar kerja sama tersebut mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal.

Akan tetapi, kecenderungan yang terjadi sudah mulai memperlihatkan bahwa pemerintah

pusat Tiongkok mulai menganggap GMS sebagai kerja sama penting yang membutuhkan perhatian di tingkat nasional. Hal ini terlihat dari keterwakilan Tiongkok yang hadir didalam pertemuan-pertemuan GMS. Pada awal-awal tahun bergabungnya Tiongkok dalam GMS, delegasi yang dikirim Tiongkok dalam pertemuan-pertemuan GMS hanya diwakili oleh pejabat tingkat bawah. Sementara pada tahun-tahun berikutnya, keterlibatan pemerintah pusat semakin terlihat. Seperti pada pertemuan tingkat tinggi GMS pada tahun 2008 di Vientiane, Tiongkok diwakili oleh Perdana Menteri Wen Jiabao.²⁸

Tiongkok juga mendirikan Kelompok Koordinasi Pembangunan Lancang–Mekong Nasional pada 1994 untuk mengoordinasi pemasaran kerja sama GMS. Yunnan secara aktif ikut serta dalam Sidang Menteri tentang Kerja Sama Ekonomi GMS. Peran pemerintah pusat lainnya juga terlihat dengan diterbitkannya *Country Report on China's Participation in the Greater Mekong Subregion Cooperation*. Selain itu, diterbitkan pula sejumlah rancangan panduan bagi Yunnan maupun Guangxi dalam melaksanakan partisipasinya di GMS.

Lebih luas, dua provinsi ini juga memiliki peran besar sebagai “pintu” yang membuka jalan bagi Tiongkok untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di Asia Tenggara. Untuk mewujudkan cita-cita kebangkitan Tiongkok secara damai, sebagaimana menjadi tujuan utama dari “Impian Tiongkok”, maka sangat penting bagi negara ini untuk menunjukkan citra sebagai negara yang berkembang tanpa membawa ancaman, melainkan membawa kemanfaatan bagi sekitarnya. Hal ini menunjukkan arah diplomasi Tiongkok dengan negara tetangganya yang menjadi semakin bersahabat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Xi Jinping bahwa prinsip dasar dalam menjalin hubungan dengan negara tetangga adalah dengan memperlakukan tetangganya sebagaimana seorang teman atau mitra, selain itu juga perlu membuat mereka merasa aman dan membantu mereka untuk berkembang.²⁹

Driving forces Behind Modern Day China, 2010. Singapura: John Wiley & Sons Pte. Ltd., hlm. 135

²⁴ Tim Summers. *Yunnan- A Chinese Bridgehead to Asia: A Case Study of China's Political and Economic Relations with its Neighbours*. 2013. Cambridge: Chandos Publishing. Hlm. 100

²⁵ Zhu Zhenming. *Log. cit.* hlm. 10

²⁶ Tim Summers. *Log. cit.*, hlm. 58

²⁷ Li Chenyang dan He Shengda, “China’s Participation in GMS Cooperation: Progress and Challenges” dalam Li Mingjiang dan Chong Guan Kwa, *China – ASEAN Sub-regional cooperation: Progress, Problems, and Prospect*. 2011, Singapura: World Scientific Publishing, hlm. 21

²⁸ Tim Summers, China and The Mekong Region, *Chinese perspectives* 3. 2008, hlm. 72

²⁹ President Xi Jinping Pitches for Friendly Neighbourhood

Kawasan GMS juga menjadi jalur yang tidak luput dari perhatian Tiongkok di dalam mengembangkan inisiatif “Satu Sabuk, Satu Jalur” untuk mengembangkan kembali Jalur Sutra darat dan maritim Tiongkok. GMS menjadi sangat penting bagi Tiongkok untuk langsung terhubung dengan wilayah di Asia Tenggara. Melalui kerja sama GMS, Tiongkok akan memanfaatkan Provinsi Yunnan dan Guangxi sebagai pintu gerbangnya di sebelah barat yang membuka keterhubungan Tiongkok dengan kawasan Asia Tenggara. Terlebih lagi, jalur aliran Sungai Mekong yang melalui lima negara ASEAN bagian utara ini berakhir di Laut Tiongkok Selatan.

Proyek pembangunan transportasi yang seolah menjadi prioritas utama di dalam GMS selain kerja sama ekonomi, apabila dilihat dari sisi Tiongkok, bisa merupakan salah satu diplomasi yang dilakukan untuk menekan adanya potensi konflik yang mungkin muncul akibat pembangunan bendungan yang dilakukan oleh Tiongkok. Pembangunan bendungan di wilayah hulu Sungai Mekong oleh Tiongkok dianggap menjadi faktor penyebab adanya kerusakan lingkungan di wilayah hilir sungai, seperti: menurunnya debit air, berkurangnya jumlah ikan, bencana banjir, hingga bencana kekeringan yang menyebabkan gagal panen masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidupnya di sekitar Sungai Mekong.

Negara-negara di sub-kawasan Mekong lainnya, yang juga merupakan negara anggota ASEAN, merupakan pasar yang besar bagi perdagangan Tiongkok. Keberadaan GMS beserta jalur koridor ekonomi yang telah dibangun di kawasan ini memberi akses bagi Tiongkok dalam mendekati sumber-sumber bahan mentah untuk pengembangan industrinya, dan semakin memudahkan Tiongkok dalam mendekati pasar bagi penjualan barang hasil produksinya. Dengan menjalin hubungan yang baik dan membantu

Policy http://articles.economicstimes.indiatimes.com/2013-10-26/news/43415788_1_south-china-sea-president-xi-jinping-neighbourhood

meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan di sub-kawasan Mekong, Tiongkok berupaya untuk meraih perdamaian dan keserasian di wilayah ini.

1.2 Kepentingan Myanmar dan Thailand dalam Kerja Sama di Subkawasan Mekong

Ada beberapa kepentingan Myanmar terhadap subkawasan Mekong, baik secara ekonomi maupun politik-keamanan. *Pertama*, Myanmar membutuhkan perbaikan infrastruktur (jalan) yang selama ini menjadi hambatan dalam pembangunan ekonominya, termasuk salah satu negara PDB perkapita terendah di Asia Pasifik.³⁰ *Kedua*, dari sektor energi, Myanmar memiliki potensi besar dalam hydropower, tetapi belum secara optimal dimanfaatkan (73% penduduknya kekurangan akses terhadap listrik tahun 2010).³¹ Myanmar membutuhkan pembangunan infrastruktur listrik yang terhubung dengan negara-negara tetangganya.

Ketiga, dari sektor perdagangan, Sungai Mekong dan subkawasan GMS penting bagi Myanmar, terutama dalam rangka menjalankan perdagangan lintas batas yang proporsinya dapat mencapai 25% dari total nilai perdagangan Myanmar.³² Selama ini, aktivitas perdagangan lintas batas masih mengalami kendala seperti sistem lisensi dan bea ekspor/impor yang tinggi. *Keempat*, Myanmar berkepentingan agar wilayah di tepi Sungai Mekong bersih dari kelompok milisi pemberontak yang selama ini menguasai wilayah tersebut.³³

Senada dengan Myanmar, Thailand juga memiliki kepentingan ekonomi dan politik-keamanan terhadap subkawasan Mekong. *Pertama*, Thailand membutuhkan suplai air Sungai Mekong untuk kepentingan irigasi

³⁰ World Bank, “Myanmar Overview”, October 2014, diakses dari <http://www.worldbank.org/en/country/myanmar/overview> pada 19 Mei 2015.

³¹ *Ibid.*

³² Winston Set Aung, *The Role of Informal Cross-Border Trade in Myanmar*; (Stockholm, Institute for Security and Development Policy, 2009).

³³ Michael Sullivan, “Mekong Flows Along Troubled Myanmar’s East”, 16 Februari 2010 diakses dari <http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=123570472> pada 13 Mei 2015.

pertanian, penyediaan air minum, dan industri ikan air tawar. Karena itu, perlu ada jaminan bahwa negara-negara di bagian hulu tidak mengeksploitasi Sungai Mekong secara berlebihan.³⁴ *Kedua*, Thailand berkepentingan untuk dapat meningkatkan ketersediaan sumber listrik dari hydropower di Sungai Mekong, baik dengan membangun bendungan sendiri maupun mengimpor listrik dari negara-negara tetangganya.³⁵

Ketiga, Thailand membutuhkan fasilitas perdagangan lintas batas, dimana negara-negara tetangga di subkawasan Mekong menjadi pasar bagi produk-produk industrinya.³⁶ *Keempat*, maraknya migrasi ilegal dari negara-negara tetangga di subkawasan Mekong yang masuk ke wilayah Thailand,³⁷ sehingga perlu ada kerja sama dalam memberantas hal tersebut.

3.3.1 Upaya Myanmar dan Thailand dalam Kerja Sama di Subkawasan Mekong

Bagi Myanmar, GMS merupakan salah satu kerja sama subregional yang secara politik aman karena hanya berfokus pada bidang ekonomi, sehingga tidak ada potensi terjadinya intervensi terhadap politik dalam negerinya.³⁸ Dari hasil keikutsertaannya sejak 1992, ada beberapa hasil yang sudah dicapai oleh Myanmar dalam GMS, mulai dari sektor pertanian, energi, lingkungan,

SDM, komunikasi, pariwisata, perdagangan dan investasi, serta transportasi.³⁹

Namun hasil yang paling menonjol adalah pembangunan *East West Economic Corridor* yang melewati kota Myawaddy di perbatasan dengan Thailand dan kota Mawlamyine yang merupakan pelabuhan laut dalam. Selain itu, Myanmar juga dilewati oleh *North South Economic Corridor* di dekat perbatasan. Dua koridor ini membantu membangun keterhubungan Myanmar dengan negara-negara tetangganya.⁴⁰

Bagi Thailand, keikutsertaannya dalam GMS sejak 1992 telah memberikan dampak positif dalam pembangunan 9 sektor yaitu pertanian, energi, lingkungan, SDM, komunikasi, pariwisata, perdagangan dan investasi, serta transportasi.⁴¹ Dari sembilan sektor ini, capaian yang menjadi ikon dan dapat dilihat secara kasat mata adalah pembangunan tiga koridor ekonomi GMS yang semuanya melewati wilayah Thailand, baik itu *East West Economic Corridor*, *North South Economic Corridor*, maupun *Southern Economic Corridor*. Ketiga koridor ini seolah menjadikan wilayah Thailand sebagai pusat/hub transportasi dan perdagangan di subkawasan Mekong. Tiga koridor ini juga menciptakan keterhubungan darat antara Thailand dengan semua negara di subkawasan, termasuk dengan Tiongkok di bagian utara.⁴²

Dalam konteks kerja sama perbatasan di Lembah Mekong ini, kerangka GMS menjadi prioritas dalam kepentingan mereka. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gerfert bahwa ada dua strategi umum yang digunakan

³⁴ "China rejects Mekong river dam criticism", diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8603112.stm> pada 10 November 2015.

³⁵ Economic Consulting Associates. "The Potential of Regional Power Sector Integration: Greater Mekong Subregion (GMS) Transmission and Trading Case Study, *ESMAP Briefing Note* 004/10 (Juni 2010), hlm.69-70

³⁶ Bank of Thailand, "Foreign Trade through Customs Houses in the Northern Region (US\$)", diakses dari <http://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=497&language=ENG>) pada 10 November 2015.

³⁷ Indriana Kartini dkk, *Masalah Ekonomi-Politik di Perbatasan Myanmar-Thailand*, Laporan Penelitian P2P LIPI, 2010. Lihat juga pada Allan Beesey, *From Lao PDR to Thailand and Home Again. The Repatriation of Trafficking Victims and Other Exploited Women and Girl Workers*, 2004, hlm.16. dikutip dari Rosita Dewi dkk, *Masalah Perbatasan Thailand-Laos...Ibid.*

³⁸ Maung Aung Myoe, "Regionalism in Myanmar's Foreign Policy: Past, Present, and Future", *Asia Research Institute Working Paper* No. 73, September 2006.

³⁹ Asian Development Bank, *Greater Mekong Subregion: Twenty years of partnership*, Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2012, hlm. 69-85.

⁴⁰ Asian Development Bank. *Asian Development Bank & Myanmar Fact Sheet*, April 2015. Diakses dari <http://www.adb.org/sites/default/files/publication/27782/mya.pdf> pada 6 November 2015.

⁴¹ Asian Development Bank, *Greater Mekong Subregion: Twenty years of partnership*, Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2012, hlm. 69-85.

⁴² Asian Development Bank, "Multisector Development in the Greater Mekong Subregion: Development of Economic Corridors", diakses dari <http://www.adb.org/countries/gms/sector-activities/multisector> pada 17 November 2015. Lihat juga dalam Athibhu Chitranukroh, "Thailand Mega Project for GMS connectivity", dalam *The 9th GMSARN International Conference 2014*, Ho Chi Minh City 12 November 2014.

dalam membangun kerja sama perbatasan. *Pertama, top-down strategy*, yaitu kerja sama perbatasan yang diinisiasi oleh aktor-aktor tingkat atas, yang biasanya dilatarbelakangi oleh kepentingan keamanan dan stabilitas kawasan. Tentunya, keputusan kedua negara untuk bergabung dalam GMS ditentukan dan diputuskan oleh pemerintah masing-masing, dan sesuai dengan strategi pembangunan nasional yang sudah ditentukan dari atas. Penting bagi Myanmar untuk mengembangkan kepentingan ekonominya ditengah rekonsiliasi politik yang mulai mengarah keperbaharuan.

Kedua, bottom-up strategy, yaitu kerja sama perbatasan yang diinisiasi aktor-aktor tingkat bawah yang dilatarbelakangi oleh masalah-masalah spesifik yang terjadi di wilayah perbatasan.⁴³ Untuk strategi yang kedua ini, Thailand terbuka untuk menampung ide atau inisiatif yang muncul dari dunia akademik seperti *Mekong Institute* yang bertempat di kota Kong Khaen, sebagai *focal point* dalam mempersiapkan pelaku-pelaku usaha menengah dan kecil bukan saja di dalam Thailand sendiri, tetapi juga dari negara-negara lain sesama anggota GMS.

Untuk tahapan dalam pembangunan kerja sama perbatasan, Charles Ricq menawarkan 6 tahapan dalam pembangunan hubungan lintas batas, yaitu 1) *total lack of relation* (ketiadaan hubungan), 2) *information-exchange (andreciprocal assessment)* (pertukaran informasi), 3) konsultasi (biasanya masih bersifat informal), 4) kerja sama (dicapainya kesepakatan), 5) harmonisasi (terhadap hukum dan peraturan), dan 6) integrasi.⁴⁴ Untuk Myanmar dan Thailand belum mencapai pada tahap harmonisasi maupun integrasi. Tidak hanya terbatas pada dua negara ini, semua negara anggota GMS relatif sama belum mencapai pada tahap ini. Sedangkan untuk tahap ke-1 hingga tahap ke-4 mereka sudah menapaki tahapan-tahapan ini.

Dari kepentingan Myanmar dan Thailand dan upaya mereka memperjuangkannya di dalam kerja sama-kerja sama di subkawasan Mekong, ada beberapa poin yang perlu menjadi

perhatian. *Pertama*, dari aspek ekonomi, sebagian kepentingan Myanmar dan Thailand telah atau sedang dipenuhi melalui berbagai program kerja sama GMS. Dengan demikian, harus diakui bahwa kerja sama subkawasan seperti GMS telah memberikan kontribusi positif bagi kedua negara dalam aspek ekonomi. *Kedua*, walaupun GMS telah berkontribusi positif terhadap perekonomian Myanmar dan Thailand, tetapi signifikansinya masih harus dikaji ulang.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Hiroyuki Taguchi, integrasi perdagangan Thailand dengan negara-negara subkawasan Mekong masih lebih rendah dibanding integrasinya dengan negara-negara ASEAN yang lebih maju seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura.⁴⁵ *Ketiga*, masih ada beberapa kepentingan ekonomi Myanmar dan Thailand yang belum terlihat terpenuhi oleh pelaksanaan kerja sama tersebut, misalnya sampai saat ini belum ada jaminan pasti bahwa ketersediaan air akan terus melimpah, karena Tiongkok telah membangun beberapa bendungan besar di hulu sungai.

Keempat, kepentingan-kepentingan politik keamanan Myanmar dan Thailand terhadap subkawasan Mekong masih belum terakomodasi, karena memang fokus kerja sama subkawasan seperti GMS hanya pada bidang ekonomi, sehingga diperlukan mekanisme kerja sama lain yang mampu mengakomodir kepentingan politik-keamanan. Dalam hal ini, kedua negara sebenarnya dapat memanfaatkan kerja sama yang sudah ada, yaitu ASEAN, untuk dapat memperjuangkan kepentingan politik-ekonominya. Dengan kata lain, diperlukan sinergi antara kerja sama subregional dengan kerja sama regional ASEAN agar masing-masing dapat berperan untuk saling melengkapi.

1.3 Kepentingan Laos, Kamboja, dan Viet Nam terhadap Subkawasan Mekong

Bagi Laos, ada beberapa kepentingan terhadap subkawasan Mekong yang cukup strategis. *Pertama*, kondisi geografis Laos yang terkungkung

⁴³ Sonya Gerfert, *Ibid.*

⁴⁴ Charles Ricq. *Handbook of Transfrontier Co-operation (2006 Edition)*. Geneva: Council of Europe, 2006.

⁴⁵ Hiroyuki Taguchi, "Trade Integration of Thailand with the Greater Mekong Sub-region: An Assessment Using the Gravity Model of Trade", *PRI Discussion Paper Series* No.11A-08, Juli 2011, hlm.1.

daratan (*land-locked state*) membuatnya sangat bergantung pada negara-negara sekelilingnya di subkawasan Mekong. Laos berkepentingan untuk mengubah posisinya dari *land-locked state*, menjadi negara *land-linked state*. Kedua, dengan kondisi perekonomian yang relatif masih belum maju dibanding negara-negara di subkawasan, Laos mengakui bahwa kerja sama dan integrasi subregional adalah bagian dari strategi pembangunannya.

Ketiga, terkait dengan panjangnya Sungai Mekong yang mengalir di wilayahnya dan sifat sungai ini yang lintas batas, Laos berkepentingan agar ada usaha bersama diseluruh negara tepian Sungai Mekong untuk mengelolanya. *Keempat*, terkait kerja sama subregional di subkawasan Mekong dapat menjadi tahapan dan pembelajaran menuju regionalisme ASEAN.⁴⁶

Adapun bagi Kamboja, subkawasan Mekong penting sebagai wadah mengejar ketertinggalan pembangunan ekonomi akibat konflik internal yang berkepanjangan. Kerja sama di subkawasan menjadi titik pangkal bagi Kamboja untuk mulai terbuka dengan dunia luar. Selain itu, Kamboja juga berkepentingan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan Danau Tonle Sap yang menjadi sumber industri perikanan darat Kamboja.⁴⁷

Sementara bagi Vietnam, subkawasan Mekong memiliki arti penting, terutama terkait dengan eksistensi Delta Sungai Mekong di bagian hilir yang dikenal sebagai lumbung padi Viet Nam. Pemeliharaan kuantitas dan kualitas air sungai merupakan faktor krusial yang menentukan keberlangsungan produksi beras dan perikanan di delta itu. Selain itu, kerja sama di subkawasan Mekong penting bagi Viet Nam untuk memperkuat aspek pembangunan pada keempat wilayah pembangunan ekonominya, yaitu Kawasan Ekonomi Utara, Kawasan Ekonomi Tengah, Kawasan Ekonomi Selatan, dan Kawasan Ekonomi Delta Mekong.⁴⁸

⁴⁶ Khamlusa Nouansavanh, "Lao PDR Perspectives and Policies towards GMS", *Ritsumeikan International Affairs*, Vol. 8 (2010): 19.

⁴⁷ Darren Posey, "Defining Interests: The Mekong River Commission", *The Journal of International Policy Solution*, Vol. 2/1 (Februari, 2005): 9.

⁴⁸ Lihat Phi Vinh Tuong, "Developing West-Northern Provinces

3.4.1 Perjuangan dan Hasil yang Dicapai

Dalam rangka menggapai kepentingannya di subkawasan Mekong, Laos melibatkan diri menjadi anggota kerja sama GMS dan MRC. Dalam konteks proses mengubah dari *land-locked state* menjadi *land-linked state*, pembangunan koridor ekonomi dalam wadah GMS telah membantu mewujudkannya. Koridor EWEC misalnya, menjadikan Laos sebagai penghubung antara Viet Nam dan Thailand. Jalur ini juga melewati Savannakhet, kota terbesar kedua di Laos. Demikian pula dengan jalur NSEC (*North South Economic Corridor*), di mana Laos menjadi penghubung antara Tiongkok dengan Thailand.

Senada dengan Laos, Kamboja juga tergabung dalam kerja sama GMS dan MRC untuk memperjuangkan kepentingannya. Hasil yang dicapai antara lain terhubungnya Kamboja dengan negara-negara di subkawasan melalui program koridor ekonomi GMS. Wilayah Kamboja dilewati oleh koridor ekonomi selatan yang memiliki dua cabang. Cabang pertama menghubungkan Bangkok dengan Kota Siem Riep di Kamboja dan berakhir di kota Quy Nhon di Viet Nam. Cabang kedua bergerak dari Bangkok menuju Phnom Penh di Kamboja hingga Vung Tao di Vietnam. Selain itu, GMS juga telah mendorong peningkatan permintaan kebutuhan dasar seperti mineral, energi, makanan dan fiber. Peningkatan ini memberikan kesempatan bagi Kamboja untuk meningkatkan produksi terutama pertanian.

Bagi Vietnam, kerja sama subregional GMS telah menjadi wadah untuk memperjuangkan kepentingannya. Salah satu hasil yang sudah didapat adalah keterhubungan Vietnam dengan negara tetangganya melalui jalur darat. Vietnam dilalui oleh tiga koridor ekonomi. *Pertama*, Koridor EWEC (*East West Economic Corridor*) yang menghubungkan kota pelabuhan Da Nang, Hue, Dong Ha, dan kota perbatasan Lao Bao di Vietnam bagian tengah dengan kota-kota di Laos, Thailand, hingga Myanmar.

of Vietnam: Challenge to Integrate with GMS Market via China-Laos-Vietnam Triangle Cooperation", dalam Masami Ishida, ed., *Five Triangle Areas in the Greater Mekong Subregion* (Bangkok: Bangkok Research Center-IDE-JETRO, 2012), hlm. 212.

Kedua, koridor NSEC, di mana terdapat dua subkoridor. Subkoridor yang pertama menghubungkan Ha Noi di Viet Nam bagian utara dengan Kunming di Yunnan–Tiongkok. Subkoridor kedua menghubungkan kota pelabuhan Hai Pong di Vietnam bagian utara dengan Nanning di Guangxi–Tiongkok. *Ketiga*, koridor SEC (*Southern Economic Corridor*), yang juga memiliki dua subkoridor. Subkoridor pertama menghubungkan kota Quy Nhon di Vietnam selatan dengan Siem Riep di Kamboja dan Bangkok di Thailand. Subkoridor kedua menghubungkan kota Vung Tao dan Ho Chi Minh City di pesisir pantai selatan Vietnam dengan Phnom Penh di Kamboja dan Bangkok di Thailand.

Dengan konektivitas sesama negara-negara ASEAN bagian Utara ini, dua hal sekaligus dapat dicapai. *Pertama*, disparitas ekonomi sesama negara ASEAN bagian Utara diharapkan dapat diperkecil. *Kedua*, bila pada awalnya kepentingan ekonomi negara—negara tersebut bersifat divergen sesuai dengan tahapan pembangunan masing-masing, tetapi melalui koridor ekonomi GMS, kepentingan-kepentingan tersebut menjadi menuju satu titik kepentingan bersama (konvergen).

1.4 Kepentingan ASEAN dalam Sub-Regional Mekong

ASEAN berkepentingan atas pembangunan ekonomi di kawasan Sungai Mekong, yang tidak dapat dilepaskan dari dasar pembentukan ASEAN itu sendiri, yaitu menjaga stabilitas politik keamanan regional, mengingat di kawasan itu sebelumnya sarat dengan konflik⁴⁹ dan berbagai persoalan politik keamanan yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama yaitu kejahatan lintas negara terutama tentang *trafficking in persons* (TIPs) dan narkoba. ASEAN memberi dukungan kepada perkembangan sub-regional Sungai Mekong, ditunjukkan dengan

⁴⁹ Jorn Dosch and Oliver Hensengerth. "Sub-Regional Cooperation in Southeast Asia: The Mekong Basin." *European Journal of East Asian Studies* 4 (2). 2005, hlm 263-286. Lihat juga Susanne Schmeier. "Regional Cooperation Efforts In The Mekong River Basin: Mitigating River-Related Security Threats And Promoting Regional Development." *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 2(2). 2006, hlm. 28-52.

dukungannya atas kerja sama dan kesepakatan yang dibangun. Namun dalam kenyataannya, ASEAN tidak mudah memuluskan kesepakatan-kesepakatannya, karena berbagai kepentingan ada di dalamnya. Tidak hanya beragamnya kepentingan lima negara anggota ASEAN, tetapi tingginya kepentingan Tiongkok atas kawasan itu menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN.

3.5.1 ASEAN diantara MRC, AMBDC dan GMS

GMS dan MRC sepertinya mempunyai makna politis yang berbeda-beda bagi ASEAN. Bila melihat awal pembentukannya, MRC merupakan hal yang penting bagi ASEAN, mengingat ASEAN terlihat bersemangat memberikan perhatiannya selain pada upaya stabilitas di kawasan itu, juga upaya memberikan perhatian khusus untuk menarik negara-negara KMLV menjadi anggota ASEAN. MRC menjadi semacam pijakan awal membangun kepercayaan bagi negara-negara KMLV. Namun demikian, dalam perkembangannya terlihat bahwa MRC menjadi lembaga yang independen, terlihat representatif negara tidak masuk di dalamnya. Berbeda dengan ASEAN, peran dan keterlibatan negara merupakan hal penting bagi ASEAN. Hal itu terlihat adanya inisiatif ASEAN pada tahun 1996 membentuk ASEAN *Mekong Basin Development Cooperation* (AMBDC) yang terdiri dari semua negara anggota ASEAN, termasuk negara-negara KMLV serta Tiongkok.

Tujuan dari forum ini adalah untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan terutama di Cekungan Mekong melalui pembentukan kemitraan ekonomi dan hubungan antara anggota riparian dan non-riparian forum. Salah satu prinsip yang mengatur kerja sama menyatakan "itu melengkapi inisiatif kerja sama yang saat ini dilakukan oleh Komisi Sungai Mekong, negara-negara donor dan lembaga multilateral lainnya". Oleh karena itu, wakil-wakil dari ADB dan MRC telah diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan AMBDC, sehingga meningkatkan koordinasi yang lebih erat dan kolaborasi antara pemain kunci yang bersangkutan.

Berbagai pejabat senior AMBDC melakukan pertemuan dengan fokus pada *Railway link* Singapura–Kunming dan proyek ekonomi serta infrastruktur terkait lainnya. Disini, Lembah Sungai Mekong cukup mencolok sebagai daerah prioritas dalam berbagai kerangka kerja sama antara ASEAN–Tiongkok, baik itu politik/keamanan, ekonomi atau sebaliknya. Bahkan, dalam Rencana Aksi terbaru untuk melaksanakan Deklarasi Bersama China ASEAN-Kemitraan Strategis untuk Perdamaian dan Kemakmuran (2005-2010), ada referensi khusus yang dibuat untuk memperkuat kerja sama di bawah kerangka Mekong DAS seperti AMBDC dan RUPS dan mencakup tindakan perlindungan lingkungan air dan sumber daya alam bersama oleh semua negara riparian di lembah sungai.⁵⁰

Dengan adanya AMBDC, ASEAN memainkan peran penting dalam pengembangan energi, sebagai upaya pengembangan yang lebih luas atas kerja sama stabilitas regional di bidang ekonomi dan politik serta sosial. Namun demikian, dari kerja sama yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral dengan Tiongkok bukanlah hal yang bisa diabaikan, mengingat telah terjadi hubungan yang kompleks.⁵¹ ASEAN tidak mudah masuk ke wilayah itu. Mengingat persoalan manajemen lingkungan tidak didiskripsikan dengan baik pada cetak biru komunitas politik dan keamanan ASEAN. Meskipun sebenarnya dalam pilar sosial budaya persoalan lingkungan menjadi salah satu fokus perhatian. Melihat persoalan secara lintas batas negara (*transboundary states*) dalam pengelolaan lingkungan agaknya belum menjadi kekuatan bagi ASEAN.

Mekanisme kerja sama dengan pola ASEAN, pada kenyataannya Tiongkok dipandang berbeda, dia masih memilih untuk tidak menjadi anggota MRC yang didirikan pada tahun 1995 itu. Namun, Tiongkok tetap dapat bekerja sama dengan mereka melalui beberapa kerangka pembangunan daerah. Mekanisme tersebut sebenarnya menguntungkan Tiongkok sebagai

aktor utama dalam mitra dialog ASEAN untuk duduk di meja perundingan guna membahas perkembangan regional negara-negara tepi sungai Mekong. Hal itu tidak menguntungkan bagi ASEAN, karena kesepakatan-kesepakatan yang dibangun Tiongkok cenderung bilateral atau trilateral. Tiongkok terlihat menghindari mekanisme ASEAN.

Meskipun kerja sama GMS memposisikan ASEAN sebagai pihak eksternal, tetapi ASEAN tidak menunjukkan keberatannya. Sepertinya apapun didukung ASEAN sepanjang stabilitas politiknya terjaga. Bagi ASEAN, kemajuan pembangunan ekonomi dengan diwarnai berbagai kerja sama, pada kenyataannya menyisakan persoalan-persoalan yang serius, yang pada ujungnya dapat mengganggu politik dan keamanan kawasan ASEAN. Salah satu yang muncul dipermukaan adalah pembangunan sebelas dam di *lower Mekong river*. Beberapa kajian menunjukkan bahwa ini akan mengganggu kelangsungan jumlah dan jenis-jenis ikan yang ada di sungai tersebut, bahkan diperkirakan akan mengancam ekosistem karena industrialisasi kawasan yang sangat pesat.⁵²

Kerja sama lingkungan sebenarnya telah dilakukan dalam kerangka ASEAN–Tiongkok. Dialog-dialog ASEAN–Tiongkok telah menghasilkan kerja sama lingkungan, dan dicapai Strategi Perlindungan Lingkungan ASEAN–Tiongkok 2009–2015 (*The ASEAN–China Strategy on Environmental Protection Cooperation 2009–2015*). Strategi perlindungan lingkungan itu meliputi enam bidang prioritas yaitu 1) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan lingkungan dan meningkatkan pendidikan lingkungan; 2) mempromosikan teknologi ramah lingkungan dan program eco-label; 3) konservasi keanekaragaman hayati; 4) bangunan lingkungan manajemen kapasitas; 5) masalah lingkungan global; 6) industri perlindungan lingkungan dan program.

Merujuk pada pendekatan ke-3 dari Lee dan Forss tentang bentuk kerja sama perbatasan, yaitu kerja sama ekonomi lintas-batas, konteks

⁵⁰ Sunchindah, “Water Diplomacy in the Lancang–Mekong River Basin: Prospects and Challenges,” *Workshop on the Growing Integration of Greater Mekong Sub-regional ASEAN States in Asian Region* at Yangon, Myanmar, on 20–21 September 2005.

⁵¹ *Ibid.*, hlm.958.

⁵² JianKedan Qi Gao. “Only One Mekong: Developing Transboundary EIA Procedures of Mekong River Basin.” *Pace Environmental Law Review* 30 (3), Summer 2013, hlm. 952 (950-1004).

hubungan kerja sama yang dibangun Tiongkok dalam GMS, maupun dalam bentuk kerja sama lainnya adalah untuk mengelola sumber daya-sumber daya lintas nasional secara bersama-sama, misalnya melalui eksplorasi sumber daya alam, perdagangan lintas batas, pembangunan kawasan industri, dan lain-lain. Kendala sudah pasti ada, meski hal ini tidak terlalu mencolok ketika melaksanakan kerja sama ekonomi lintas batas, misalnya perbedaan kepentingan secara hakiki, aturan, politik, serta administrasi yang berlaku di masing-masing negara. Kendala ini akan lebih tampak pada kerja sama pengelolaan sumber daya yang dianggap strategis seperti energi dan mineral karena berkaitan erat dengan kepentingan nasional masing-masing negara.⁵³

Khusus terkait dengan manajemen air Sungai Mekong, ASEAN dan mitra dialognya melakukan pembentukan *ASEAN Working Group on Water Resources Management* (AWGWRM) pada bulan Juli 2002, dengan dukungan dari *the Southeast Asia Technical Advisory Committee* (SEATAC) dari *Global Water Partnership* (GWP). AWGWRM di bawah Menteri-menteri ASEAN yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Rencana Strategis tersebut didukung oleh *Integrated Water Resources Management* (IWRM), yang memiliki prinsip partisipasi *multi-stakeholder* dan integrasi lintas sektoral. Fokus cakupannya antara lain manajemen air yang efisien dan efektif, promosi pembagian yang adil antara pengguna air dan perlindungan lingkungan, mitigasi bahaya yang berhubungan dengan air dan pemeliharaan keseimbangan ekologi, meningkatkan tata kelola air, pemberdayaan pemangku kepentingan sektor air, peningkatan desentralisasi, proses partisipatif dan *multi-stakeholder* pengambilan keputusan, pengarusutamaan masalah gender dan pengakuan air sebagai aset alami dengan fungsi dan nilai-nilai sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi.⁵⁴

⁵³ Sangsoo Lee dan Alec Forss. *Dispute resolution and cross-border cooperation in northeast Asia: Reflections on the nordic experience (Asia Paper)*. Stockholm: Institute for Security and Development Policy, 2011; serta Rongxing Guo, *Cross-border resource management: Theory and practice*. Amsterdam: Elsevier, 2005.

⁵⁴ ApichaiSunchindah. "Water Diplomacy in the Lancang-Mekong River Basin: Prospects and Challenges." *Workshop on the Growing Integration of Greater Mekong Sub-regional ASEAN States in Asian Region*. di Yangon, Myanmar pada 20

Hal itu kembali dipertegas dalam Deklarasi Chiangmai terkait dengan pengelolaan air di Asia Tenggara pada tanggal 21 November 2003, yang kemudian pada tanggal 3 September 2005 ditindaklanjuti dengan Deklarasi Bali tentang pengelolaan sumber daya air di Asia Tenggara, dimana ditindaklanjuti dalam rencana aksi dan implementasinya. Salah satu isu utama yang tercantum dalam deklarasi ini adalah untuk "meningkatkan kerja sama damai antarpengguna, dan sinergi antara perbedaan penggunaan air di semua tingkatan dalam kasus batas dan sumber daya lintas batas air di antara negara-negara yang bersangkutan melalui pengelolaan DAS yang berkelanjutan, termasuk akuifer air tanah, sebagai bagian dari IWRM, atas dasar hukum, atau pendekatan lain yang tepat."⁵⁵ Sejalan dengan ini, Keputusan Menteri-menteri ASEAN adalah AWGWRM bisa sangat baik menjadi ujung tombak untuk mengatasi beberapa masalah riparian hulu-hilir berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Hal ini akan menambah relevansi dan signifikansi peran AWGWRM dan AMBDC dan menanamkan praktek-praktek IWRM lebih tegas dalam arus utama kerja sama ASEAN-Tiongkok.

ASEAN memang *committed* pada integrasi regional dengan tekanan memperkecil kesenjangan pembangunan di antara anggotanya. *Initiative for ASEAN Integration* (IAI) *Work Plan for Narrowing the Development Gap* dirumuskan untuk membantu negara anggota baru dalam mengecilkan kesenjangan pembangunan di antara mereka sendiri dan mempercepat integrasi regional, mendorong pembangunan ekonomi yang *equitable* dan membantu mengentaskan kemiskinan di KLMV. "Tujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan konsisten dengan komitmen ASEAN untuk membangun suatu komunitas ekonomi."⁵⁶

Ada banyak proyek sub-regional dan nasional dalam kerangka kerja sama ini yang masih memerlukan pendanaan. Negara-negara

– 21 September 2005. http://www.aseanfoundation.org/MISIS-KAS_Workshop_on_GMS-Paper-1/ (diakses 1 Juni 2015).

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Chap Sotharith, "Development Strategy for CLMV in The Age of Economic Integration," *Executive Summary*. hal. 3 <http://www.eria.org/RPR-2007-4.pdf> (diak 22.4.2015)

ini mengakui bahwa memobilisasi dana bagi kegiatan yang dirancang merupakan prioritas dan sekaligus tantangan bagi semuanya. Mereka menekankan pentingnya kerja sama dengan badan-badan bantuan internasional dan sektor swasta untuk membiayai berbagai proyek di dalam negeri mereka masing-masing serta lintas negara. Negara-negara ASEAN menegaskan pentingnya mengundang mitra dialog mereka untuk membantu proyek-proyek AMBDC, khususnya dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas.

AMBDC dibentuk untuk mendorong integrasi ekonomi di antara negara anggota dan dengan demikian membantu membangun Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Kerangka kerja sama ini mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia di sub-wilayah ini; ia memungkinkan *sharing of the resource base* di antara negara anggota ASEAN dan negara tepi sungai Mekong dan Tiongkok sambil mendorong pertumbuhan yang inklusif dan *equitable* di wilayah itu. Kerangka kerja sama ini juga mendapat pengakuan internasional bagi Lembah Mekong sebagai wilayah pertumbuhan. ASEAN dan Tiongkok mengakui pentingnya memperkuat kemitraan ekonomi dalam mendorong dan melestarikan Lembah Mekong.

3.5.2 Kerja Sama dalam Kerangka ACFTA

Kerja sama ASEAN dan Tiongkok pada kenyataannya mempunyai keragaman bentuk dan level. Komitmen ASEAN maupun pemerintah Tiongkok untuk ACFTA sepertinya tidak termotivasi semata-mata oleh faktor ekonomi, tetapi lebih melihat ACFTA merupakan alat yang potensial untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan untuk memulihkan beberapa dinamisme ekonomi yang tampaknya telah hilang sejak krisis Asia.⁵⁷ Sementara itu, dapat dipastikan ACFTA merupakan sarana memperluas peluang perdagangan dengan wilayah besar yang secara geografis dekat

⁵⁷ Park, Donghyun. "The Prospects of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA): A Qualitative Overview." *Journal of the Asia Pacific Economy*, Vol. 12, No. 4, November 2007, hlm. 499. (485-503)

serta mendorong ekonomi ASEAN untuk lebih kompetitif yang mampu menciptakan saling menguntungkan. Namun, bila dilihat secara geopolitik, peningkatan kekuatan Tiongkok dan menjadi kekuatan ekonomi besar ini akan memanfaatkan jalur Sungai Mekong dalam kepentingan yang pada ujungnya menghubungkan ke Laut China Selatan. Oleh karena itu dapat dipastikan kepentingan "Silk Road" menjadi target utamanya.

2.5.3 Pengembangan Penanganan Kejahatan Transnasional

Persoalan pemanfaatan Sungai Mekong bukanlah sebatas persoalan ekonomi, tetapi juga sosial budaya dan politik-keamanan. Mayoritas masyarakat yang hidup di pinggir sungai pada kenyataannya masih dalam kategori miskin, sulit untuk mengembangkan diri dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, keluar dari wilayahnya dengan bantuan apapun dan siapapun menjadi pemandangan sehari-hari bagi mereka.

TIPs (*Trafficking in Persons*) dan penyelundupan narkoba merupakan dua isu utama kejahatan lintas negara yang seringkali lolos dari pengawasan perbatasan mereka. Diketahui bahwa bagian dari Sungai Mekong yang dikenal dengan Delta Mekong merupakan penghasil opium yang berkualitas tinggi dan dipasok ke seluruh dunia. Demikian pula TIPs dari kawasan Tiongkok yang masuk ke negara-negara ASEAN, maupun dari negara-negara KMLV ke Thailand dan Malaysia mengalami intensitas yang tinggi dibandingkan kawasan ASEAN lainnya. Sungai Mekong merupakan kawasan yang dimanfaatkan sebagai lokasi yang menguntungkan bagi jaringan untuk mengembangkan bisnis mereka.

Disini, ASEAN mempunyai kepentingan tinggi bukan hanya pembangunan ekonomi, tetapi juga politik keamanan dan sosial budaya atas kawasan Sungai Mekong. Kejahatan transnasional meningkat di kawasan Sungai Mekong, yang lebih buruk lagi adalah banyak yang melakukan penyeberangan perbatasan yang tidak sah. Ditegaskan pula bahwa perdagangan manusia dan narkoba sudah menjadi masalah besar di perbatasan yang ada di seluruh wilayah, proyek lintas-perbatasan baru yang diusulkan

oleh lembaga keuangan dan ASEAN sendiri kemungkinan hanya akan membuat masalah lebih buruk.⁵⁸ Pelintas batas melalui sungai Mekong ini sarat dengan kejahatan lintas negara, hal itu tidak lepas dari tingginya mobilitas manusia, tidak hanya turis, tetapi warga masyarakat dari Myanmar, Kamboja, Laos dan Vietnam yang mencari pekerjaan sebagai pekerja migran yang umumnya menuju atau transit di Thailand. Mobilitas yang tinggi yang umumnya dari warga yang miskin, mengakibatkan mereka jatuh pada kejahatan lintas negara.

3.6 Penutup

Subkawasan Sungai Mekong mulai mendapat banyak perhatian internasional. Hal ini terbukti dari terbentuknya banyak kerja sama di subkawasan ini, seperti GMS, MRC, AMBDC, hingga ACMECS. Munculnya banyak kerja sama di subkawasan Sungai Mekong menunjukkan bahwa posisi subkawasan ini merupakan posisi strategis yang memiliki banyak potensi.

Akan tetapi, kerja sama perbatasan di subkawasan Mekong yang melibatkan negara-negara ASEAN bagian utara dan Tiongkok ini menghadapi problematika. Dengan banyaknya skema kerja sama yang terbentuk, menimbulkan potensi tumpang tindih, baik di bidang kerja sama ataupun dalam hal aktor-aktor yang terlibat. Dari segi bidang kerja sama, hampir semua mengarah pada pembangunan ekonomi di subkawasan ini. Sementara, dari segi aktor yang terlibat, negara-negara anggota kerja sama-kerja sama tersebut relatif sama, yaitu Kamboja (GMS, MRC, AMBDC, dan ACMECS), Laos (GMS, MRC, AMBDC, dan ACMECS), Myanmar (GMS, BIMSTEC, AMBDC, dan ACMECS), Thailand (GMS, MRC, BIMSTEC, AMBDC, dan ACMECS), Vietnam (GMS, MRC, AMBDC, dan ACMECS), dan Tiongkok (GMS, dan AMBDC).

Dalam perkembangannya, ada kerja sama yang telah menunjukkan hasil kerja yang nyata. GMS misalnya, telah membangun infrastruktur

jalan lintas negara melalui program *GMS Economic Corridor*, seperti *East – West Economic Corridor*, *North – South Economic Corridor*, *Southern Economic Corridor*. Pembangunan koridor-koridor ekonomi di atas telah berhasil membantu mewujudkan keterhubungan fisik (*physical connectivity*) antarnegara maupun kesalingterhubungan antarwilayah. Contoh lain, MRC, telah melaksanakan beberapa program seperti *River Monitoring and Forecasting*, *Drought Management Program*, dan *Flood Management and Mitigation Program* dalam rangka pengelolaan banjir di Sungai Mekong. Namun, ada pula kerja sama yang masih bergerak dalam level diskusi, koordinasi, dan perencanaan program.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa aspek yang membedakan GMS dan MRC. *Pertama*, dari segi keanggotaannya, apabila dalam GMS semua negara yang dilewati oleh Sungai Mekong ikut tergabung sebagai anggota, sementara di dalam MRC negara adalah negara-negara yang berada di bagian bawah Sungai Mekong. Tiongkok dan Myanmar, yang berada di bagian hulu Sungai Mekong, tidak ikut tergabung di dalam MRC, dan hanya terlibat sebagai mitra dialog saja.

Kedua, dapat ditinjau dari cakupan isu yang diperjuangkan dalam dua kerja sama tersebut. Dalam GMS, isu yang diperjuangkan lebih luas apabila dibandingkan dengan MRC. GMS tidak hanya fokus kepada permasalahan pengelolaan banjir dan sumber daya air, sebagaimana yang dilakukan oleh MRC. Lebih jauh, GMS juga mempromosikan pengembangan integrasi ekonomi di subkawasan Mekong. Jika GMS lebih banyak menekankan pada perkembangan kawasan melalui pembangunan ekonomi dan keterhubungan, MRC lebih banyak menggalang kepentingan bersama antarnegara anggotanya berdasarkan kesadaran bersama untuk mengembangkan kegiatan perekonomian dan pembangunan industri di subkawasan Mekong.

Tiongkok sebagai negara yang terletak di bagian paling hulu Sungai Mekong memiliki kepentingan besar untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di Sungai Mekong. Tiongkok memperoleh sumber energi yang cukup besar dari bendungan-bendungan yang ia bangun

⁵⁸ Penjelasan Jeremy Douglas, sebagai Perwakilan regional untuk Asia Tenggara dan Pasifik untuk Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dalam tulisan Philip Heijmans. "ASEAN's Transnational Crime Networks: New Infrastructure within The Region may be Facilitating Cross-Border Crime." *the Diplomat*. 17 Februari 2015. <http://thediplomat.com/2015/02/aseans-transnational-crime-networks/> (diakses 2 Juni 2015).

di sekitar sungai. Bendungan yang dibangun Tiongkok tersebut merupakan pembangkit tenaga listrik dengan skala besar yang digunakan untuk menyokong perkembangan industri dan perekonomian Tiongkok.

Pembangunan infrastruktur dan transportasi di dalam GMS juga sangat penting bagi Tiongkok untuk menghubungkan jalur darat antara Tiongkok baratdaya dengan jazirah Indochina. Posisi Yunnan dan Guangxi –dua provinsi Tiongkok yang mewakili keanggotaannya dalam GMS- yang berbatasan langsung dengan Vietnam menjadi pembuka jalan bagi Tiongkok untuk mendekati sumber-sumber bahan mentah bagi industrinya, dan menjadi jalan menuju pasar yang lebih besar.

Ada beberapa kepentingan Myanmar terhadap subkawasan Mekong, baik secara ekonomi maupun politik-keamanan. *Pertama*, Myanmar membutuhkan perbaikan infrastruktur (jalan) yang selama ini menjadi hambatan dalam pembangunan ekonominya, yang termasuk sebagai salah satu negara PDB perkapita terendah di Asia Pasifik. *Kedua*, dari sektor energi, Myanmar memiliki potensi yang besar dalam hydropower tetapi belum termanfaatkan dengan optimal, dimana pada tahun 2010, 73% penduduknya kekurangan akses terhadap listrik.

Thailand membutuhkan suplai air Sungai Mekong untuk kepentingan irigasi pertanian, penyediaan air minum, dan industri ikan air tawar. Karena itu, perlu ada jaminan bahwa negara-negara di bagian hulu tidak mengeksploitasi Sungai Mekong secara berlebihan. Thailand berkepentingan untuk dapat meningkatkan ketersediaan sumber listrik dari hydropower di Sungai Mekong, baik dengan membangun bendungan sendiri maupun mengimpor listrik dari negara-negara tetangga.

Laos memiliki kepentingan atas subkawasan Mekong. Kondisi geografis Laos yang terkungkung daratan (*land-locked state*) membuatnya sangat bergantung pada negara-negara sekelilingnya di subkawasan Mekong. Laos berkepentingan untuk mengubah posisinya dari *land-locked state*, menjadi negara *land-linked state*. Sedangkan Kamboja, subkawasan Mekong penting sebagai wadah mengejar ketertinggalan pembangunan ekonomi akibat

konflik internal yang berkepanjangan. Kerja sama di subkawasan menjadi titik pangkal bagi Kamboja untuk menjalin jaringan dan terbuka dengan dunia luar. Selain itu, Kamboja juga berkepentingan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan Danau Tonle Sap yang menjadi sumber industri perikanan darat Kamboja.

Vietnam memaknai subkawasan Mekong memiliki arti penting, terutama terkait eksistensi Delta Sungai Mekong di bagian hilir yang terkenal sebagai lumbung padi. Pemeliharaan kuantitas dan kualitas air sungai merupakan faktor krusial yang menentukan keberlangsungan produksi beras dan perikanan di delta tersebut. Selain itu, kerja sama di subkawasan Mekong penting bagi Vietnam untuk memperkuat aspek pembangunan ekonominya.

Kerja sama di subkawasan Mekong tidak dapat dilepaskan dari ASEAN, karena dari enam negara yang dilalui oleh Sungai Mekong, lima di antaranya merupakan negara anggota ASEAN. ASEAN berkepentingan untuk menjaga stabilitas politik keamanan regionalnya, terutama di kawasan yang semula rawan dengan konflik, sebagaimana yang menjadi tujuan dari dasar pembentukan ASEAN itu sendiri. Di samping itu, ASEAN juga memiliki sejumlah persoalan politik keamanan yang merupakan pekerjaan rumah bersama seluruh anggota ASEAN, yaitu kejahatan lintas negara terutama *trafficking in persons* (TIPs) dan narkoba. Meskipun ASEAN memberikan dukungan terhadap perkembangan kerja sama di subkawasan Mekong, tetapi pada kenyataannya, kesepakatan-kesepakatan yang dicapai di dalam subkawasan Mekong tidak serta merta dengan mudah dapat diloloskan oleh ASEAN.

ASEAN mempunyai kepentingan tinggi bukan hanya pembangunan ekonomi, tetapi juga politik keamanan dan sosial budaya atas kawasan sungai Mekong. Kejahatan transnasional meningkat di kawasan Sungai Mekong, yang lebih buruk lagi adalah banyak yang melakukan lintas perbatasan secara ilegal. Pelintas batas melalui Sungai Mekong ini sarat dengan kejahatan lintas negara, hal itu tidak lepas dari tingginya mobilitas manusia, tidak hanya turis, tetapi warga masyarakat dari Myanmar, Kamboja, Laos dan Vietnam yang mencari

pekerjaan sebagai pekerja migran yang umumnya menuju atau transit di Thailand. Mobilitas yang tinggi yang umumnya dari warga yang miskin, mengakibatkan mereka jatuh pada kejahatan lintas negara.

Referensi

- Asian Development Bank, *Greater Mekong Subregion: Twenty years of Partnership*. Mandaluyong City. Philippines: Asian Development Bank, 2012.
- ADB/ Evaluation Study, “Greater Mekong Subregion; Maturing and Moving Forward”, 2008.I
- ADB, *The Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program, Strategic Framework 2012-2022*.
- Alexander Betts, “Conceptualising Interconnections in Global Governance: the Case of Refugee Protection”, *RSC Working Paper Series* No.38. Oxford, University of Oxford, 2006.
- Dosch, Jorn and Oliver Hensengerth, 2005 “Sub-Regional Cooperation in Southeast Asia: The Mekong Basin.” *European Journal of East Asian Studies* 4 (2). Susanne, Schmeier, 2006, “Regional Cooperation Efforts In The Mekong River Basin: Mitigating River-Related Security Threats And Promoting Regional Development.” *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 2(2).
- Economic Consulting Associates. “The Potential of Regional Power Sector Integration: Greater Mekong Subregion (GMS) Transmission and Trading Case Study, *ESMAP Briefing Note* 004/10 (Juni 2010).
- Jian, Kedan Qi Gao. “Only One Mekong: Developing Transboundary EIA Procedures of Mekong River Basin.” *Pace Environmental Law Review* 30 (3). Summer 2013.
- Kartini, Indriana dkk, *Masalah Ekonomi-Politik di Perbatasan Myanmar-Thailand*, Laporan Penelitian P2P LIPI, 2010
- Li, Chenyang dan He Shengda, “China’s Participation in GMS Cooperation: Progress and Challenges” dalam Li Mingjiang dan Chong Guan Kwa, *China – ASEAN Sub-regional cooperation: Progress, Problems, and Prospect*. 2011, Singapura: World Scientific Publishing.
- Mekong River Commission (MRC), *Treaties and Alliances of the World*, edisi ke-8, London, John Harper Publishing, 2007.
- Mekong River Commission (MRC), *Treaties and Alliances of the World*, edisi ke-8, London, John Harper Publishing, 2007.
- Mingjiang Li and Chong Guan Kwa, *China-Asean Sub-Regional Cooperation. Progress, Problems and Prospect*, Singapore: World Scientific Publishing, 2011
- Maung Aung Myoe, “Regionalism in Myanmar’s Foreign Policy: Past, Present, and Future”, *Asia Research Institute Working Paper* No. 73, September 2006.
- Nouansavanh, Khamlusa, “Lao PDR Perspectives and Policies towards GMS”, *Ritsumeikan International Affairs*, Vol. 8 (2010): 19.
- Perkmann, Markus, “Cross-border Regions in Europe: Significance and Drivers of Regional Cross-Border Co-operation”. Dalam *European Urban and Regional Studies* 10(2): 153–171.
- Posey, Darren, “Defining Interests: The Mekong River Commission”, *The Journal of International Policy Solution*, Vol. 2/1 (Februari, 2005): 9.
- Phi, Vinh Tuong, 2012, “Developing West-Northern Provinces of Vietnam: Challenge to Integrate with GMS Market via China-Laos-Vietnam Triangle Cooperation”, dalam Masami Ishida, ed., *Five Triangle Areas in the Greater Mekong Subregion*, Bangkok: Bangkok Research Center-IDE-JETRO.
- Park, Donghyun, “The Prospects of the ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA): A Qualitative Overview.” *Journal of the Asia Pacific Economy*, Vol. 12, No. 4, November 2007.
- Ricq, Charles, *Handbook of Transfrontier Co-operation (2006 Edition)*. Geneva: Council of Europe, 2006.
- Ricq, Charles, *Handbook of Transfrontier Co-operation (2006 Edition)*. Geneva: Council of Europe, 2006.
- Rongxing, Guo, 2005, *Cross-border resource management: Theory and practice*. Amsterdam: Elsevier,
- Summers, Tim, “China and The Mekong Region”, *China Perspective* 2008, No. 3.
- Sangsoo, Lee dan Alec Forss, 2011, *Dispute resolution and cross-border cooperation in northeast Asia: Reflections on the nordic experience (Asia Paper)*, Stockholm: Institute for Security and Development Policy.
- Taguchi, Hiroyuki, “Trade Integration of Thailand with the Greater Mekong Sub-region: An Assessment Using the Gravity Model of Trade”, *PRI Discussion Paper Series* No.11A-08, Juli 2011,
- Winston Set Aung, *The Role of Informal Cross-Border Trade in Myanmar*, (Stockholm, Institute for Security and Development Policy, 2009).

Zhu Zhenming, "Mekong Development and China's (Yunnan) Participation in the Greater Mekong Subregion Cooperation", *Ritsumeikan International Affairs* Vol. 8. 2010.

Internet

Asian Development Bank. *Asian Development Bank & Myanmar Fact Sheet*, April 2015. Diakses dari <http://www.adb.org/sites/default/files/publication/27782/mya.pdf> pada 6 November 2015.

ADB Evaluation Study-Transport and Trade Facilitation in the Greater Mekong Subregion—Time to Shift Gears. Reference Number: SAP: REG 2008-86Sector Assistance Program Evaluation December 2008, <http://www.oecd.org/countries/mongolia/42228102.pdf>

Asian Development Bank, "Multisector Development in the Greater Mekong Subregion: Development of Economic Corridors", diakses dari <http://www.adb.org/countries/gms/sector-activities/multisector> pada 17 November 2015. Lihat juga dalam Athibhu Chitranukroh, "Thailand Mega Project for GMS connectivity", dalam *The 9th GMSARN International Conference 2014*, Ho Chi Minh City 12 November 2014.

Bank of Thailand, "Foreign Trade through Customs Houses in the Northern Region (US\$)", diakses dari <http://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=497&language=ENG>) pada 10 November 2015.

"China rejects Mekong river dam criticism", diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8603112.stm> pada 10 November 2015.

Gerfert, Sonya, *Cross-border Cooperation: Transforming Borders*. Diakses dari http://essay.utwente.nl/60149/1/BSc_S_Getfert.pdf pada 4 Maret 2015.

Michael Sullivan, "Mekong Flows Along Troubled Myanmar's East", 16 Februari 2010 diakses dari <http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=123570472> pada 13 Mei 2015.

The ASEAN Secretariat. *Master Plan on ASEAN Connectivity*. Hlm. i, Diakses dari <http://www.asean.org/images/2012/publications/Master%20Plan%20on%20ASEAN%20Connectivity.pdf> pada 3 Maret 2015.

President Xi Jinping Pitches for Friendly Neighbourhood Policy http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-10-26/news/43415788_1_south-china-sea-president-xi-jinping-neighbourhood

Sotharith, Chap, "Development Strategy for CLMV in The Age of Economic Integration," *Executive Summary*. <http://www.eria.org/RPR-2007-4.pdf>, diakses 22.4.2015.

Sunchindah, Apichai, "Water Diplomacy in the Lancang-Mekong River Basin: Prospects and Challenges," *Workshop on the Growing Integration of Greater Mekong Sub-regional ASEAN States in Asian Region* at Yangon, Myanmar, on 20 – 21 September 2005. http://www.aseanfoundation.org/MISIS-KAS_Workshop_on_GMS-Paper-1/, diakses 1 Juni 2015.

World Bank, "Myanmar Overview", October 2014, diakses dari <http://www.worldbank.org/en/country/myanmar/overview> pada 19 Mei 2015.

TENTANG PENULIS

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana di Department of Politics, University of Sheffield dengan Program Studi MSc in Politics with Research Method. Pernah bekerja di beberapa lembaga penelitian, serta melakukan beberapa aktivitas *freelance*. Selain menempuh studi pascasarjana, juga menulis kolom untuk beberapa media. Minat Kajiannya terletak pada keterkaitan antara Gerakan Sosial dan Politik Internasional, dengan isu spesifik pada Islam Politik, Masyarakat Sipil, Regionalisme, dan Politik Identitas. Aktif sebagai Ketua Divisi Kajian Lingkaran Studi Cendekia dan Wakil Ketua PCI Muhammadiyah Inggris Raya 2015-2017. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: armumar1@sheffield.ac.uk

Arwin Datumaya Wahyudi Sumari

Penulis saat ini aktif sebagai analis Kebijakan Rencana Kontijensi Ekonomi dalam Kedeputian Politik dan Strategi, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Gelar Doktorat diperoleh dari Institute Teknologi Bandung, jurusan Teknik Elektro dan Informasi. Penulis juga pernah bergabung sebagai peneliti di Intelligent System Research Group (ISRG) dan Signal and System Laboratory (SSL) ITB. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: arwin.sumari@dkn.go.id atau arwin.sumari@yahoo.com

Awani Irewati

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Internasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. S1 ilmu Hubungan Internasional diselesaikan di FISIP Universitas Airlangga, Surabaya. Gelar S2 diperoleh dari Asia and International Studies di Griffith University, Brisbane, Australia. Ia menekuni kajian utama tentang perbatasan antarnegara, khususnya perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga melakukan kajian kajian perbatasan antara Thailand dengan negara-negara tetangganya,

serta mengkaji pendekatan konsep *connectivity* maupun *interconnectivity* di wilayah ASEAN dan sekitarnya. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: irewatiawani@yahoo.co.id.

David Putra Setyawan

Penulis adalah pemerhati masalah diplomasi pertahanan nasional dan aktif sebagai Deputi Informasi dan Komunikasi dalam Lingkaran Studi Strategis. Gelar Magister diperoleh dari Universitas Pertahanan Indonesia, Program Studi Diplomasi Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: fa.davidsetyawan@gmail.com

Diandra Mengko Megaputri

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Pendidikan S1 Hubungan Internasional diselesaikan di Universitas Katolik Parahyangan, sementara pendidikan S2 pada bidang ilmu Manajemen Pertahanan diselesaikan di Universitas Pertahanan Indonesia. Pernah aktif sebagai peneliti pada Indonesia Center for Diplomacy, Democracy, and Defense pada tahun 2012-2013. Minat kajiannya adalah isu-isu yang berhubungan dengan pertahanan, keamanan, Security Sector Reform (SSR), dan Industri Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: diandramengko@yahoo.com

Fathimah Fildzah Izzati

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, anggota redaksi *Indoprogress*, dan penulis buku *Politik Serikat Buruh dan Kaum Precariat: Pengalaman Tangerang dan Karawang*. Pendidikan S1 di bidang Ilmu Politik di tempuh di Universitas Indonesia. Penulis menekuni studi-studi yang berkaitan dengan isu ekonomi politik, buruh, perempuan dan politik. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: fildzah.izzati@gmail.com

Ikrar Nusa Bhakti

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari FISIP-UI dan gelar Ph.D di bidang Sejarah dan Politik dari School of Modern Asian Studies, Griffith University Brisbane, Australia. Beberapa kontribusi tulisannya antara lain termuat dalam buku Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Bila ABRI Berbisnis, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru (Penerbit Mizan, Bandung), The Fall of Soeharto, Human Security in Asia, Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), serta di jurnal-jurnal ilmiah maupun surat kabar lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: ikrar.lipi@gmail.com

Khanisa Krisman

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Gelar S1 Hubungan Internasional diperoleh dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010. Sementara pendidikan S2 jurusan Hubungan Internasional ditempuh di College of Asia and The Pacific, Australian National University. Ia menekuni studi-studi terkait perkembangan Information and Communications Technology (ICT), isu-isu cyber dan sosial media dalam Hubungan Internasional, serta isu-isu terkait regionalisme di Asia Tenggara dan ASEAN. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: khanisa_krisman@yahoo.com.

Nanto Sriyanto

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Gelar S1 Hubungan Internasional diperoleh dari Universitas Padjajaran. Sementara pendidikan S2 ditempuh di The University of Queensland, Australia, School of Political Science and International Studies. Ia menekuni studi-studi terkait perkembangan keamanan internasional dan kawasan, politik luar negeri Indonesia serta kajian teori hubungan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: nantosriyanto@gmail.com

Sandy Nur Ikfal Raharjo

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Latar belakang pendidikannya adalah Ilmu Hubungan Internasional untuk S1 dan Resolusi Konflik untuk S2. Ia menekuni studi-studi pembangunan wilayah perbatasan, sengketa dan konflik perbatasan, serta isu-isu stabilitas keamanan regional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: sandy.raharjo@gmail.com.

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

